

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian Kab. Beltim

 kominfo.beltim.go.id

 [Diskominfo Beltim](#)

 [diskominfobeltim](#)

 [DISKOMINFO Beltim](#)

 [@kominfoBeltim](#)

 [Radio Belitang Timur](#)

 [Lawang Beltim](#)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur yang telah tersusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan hasil kinerja Tahun Anggaran 2025 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan Satuan Kerja. Di dalam laporan ini disampaikan realisasi pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan, pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan, serta pengukuran kinerja dengan melihat indikator kinerja yang bisa tercapai di tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam menyajikan Laporan Kinerja ini. Segala perbaikan dan koreksi dari berbagai pihak akan menjadi perhatian bagi kami baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang maupun penyusunan laporan ini guna kesempurnaannya. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur disusun, dengan harapan bahwa Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur Tahun 2025 ini bisa memberi kontribusi dan manfaat terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur menuju pemerintahan *good governance* yang diharapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, memberi masukan, saran dan pemikiran dalam penyusunan laporan ini.

Manggar, 13 Februari 2026

Pt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Pattono, S.Pd
Pembina TK I /IVb
NIP. 19690909 199412 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan.....	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Dasar Hukum.....	I.1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I.2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo SP Kab.Belitang Timur	I.2
1.3.2. Struktur Organisasi Diskominfo SP Kab.Belitang Timur	I.3
1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Diskominfo SP Kab.Belitim.....	I.4
1.4. Kepegawaian	I.5
1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I.5
1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I.5
1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I.6
1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I.6
1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I.6
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja	I.7
1.6. Ruang Lingkup	I.7
1.7. Teknik Pengumpulan Data.....	I.8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II.1
2.1. Perencanaan Kinerja	II.1
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra SKPD)	II.1
2.1.1.1. Visi dan Misi	II.1
2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran	II.1
2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan	II.2
2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2025-2029	II.3
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU SKPD)	II.10
2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	II.12
2.2. Perjanjian Kinerja	II.17
Bab III Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	III.1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III.1
3.2 Evaluasi Kinerja	III.3
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III.4
3.4 Akuntabilitas Keuangan	III.53
Bab IV Penutup	IV.1
Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1	Jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi I-5
Tabel 1.4.2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan I-5
Tabel 1.4.3	Jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi I-6
Tabel 1.4.4	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan I-6
Tabel 1.4.5	Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian I-6
Tabel 1.5	Jumlah sarana dan prasarana kerja I-7
Tabel 2.1	Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran Renstra SKPD dengan RPJMD II-4
Tabel 2.2	Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD II-5
Tabel 2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana target capaian indikator tahun 2021-2026 II-7
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) II-9
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) II-12
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 II-15
Tabel 3.1	Kategori, nilai, dan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran..... III-1
Tabel 3.2	Evaluasi pengukuran kinerja III-2
Tabel 3.3	Evaluasi indikator kinerja sasaran III-3
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Tahun 2022..... III-4
Tabel 3.5	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.1 III-6
Tabel 3.6	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.1. III-14
Tabel 3.7	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.2. III-17
Tabel 3.8	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.2. III-20
Tabel 3.9	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.3 III-22
Tabel 3.10	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.3 III-28
Tabel 3.11	Evaluasi Pengukuran Capaian kinerja sasaran pada indikator Sasaran 1.1.4..... III-29
Tabel 3.12	Analisis Capaian Indikator sasaran pada indikator Sasaran 1.1.4..... III-33
Tabel 3.13	Rincian Alokasi Anggaran Diskominfo Tahun 2022..... III-34
Tabel 3.14	Alokasi Anggaran Belanja Operasi untuk mencapai sasaran..... III-34
Tabel 3.15	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai sasaran..... III-35
Tabel 3.16	Akuntabilitas keuangan program/kegiatan/Sub kegiatan..... III-35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Diskominfo, Statistik dan Persandian	I-4
Gambar 2	Tampilan halaman Survey.....	III-8
Gambar 3	Tampilan Website PPID Kabupaten Belitang Timur.....	III-9
Gambar 4	Tampilan Aplikasi Timoer	III-15
Gambar 5	Tampilan Halaman Aplikasi Nyaman Kerje	III-16
Gambar 6	Tampilan Lawang Beltim.....	III-17
Gambar 7	Tampilan Aplikasi e TPP.....	III-19
Gambar 8	Tampilan Aplikasi Simpel.....	III-20
Gambar 9	Tampilan CMS Website OPD	III-21
Gambar 10	Tampilan Antar Muka Sistem Data dan Statistik Terintegrasi	III-29
Gambar 11	Tampilan Antar Muka Sistem Survey Statistik Sektoral Terintegrasi	III-30
Gambar 12	Tampilan Antar Muka Sistem Data dan Statistik Terintegrasi	III-30
Gambar 13	Tampilan Prinsip SDI (Interoperabilitas Data)	III-32
Gambar 14	Tampilan Prinsip SDI (Standar Data, metadata)	III-33
Gambar 15	Tampilan Alat Evaluasi Indeks Kami	III-41
Gambar 16	Tampilan Pengukuran indeks Kami.....	III-43
Gambar 17	Tampilan Survey Kepuasan Masyarakat.....	III-50



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Sebagai Dinas yang membawahi urusan Komunikasi, dan informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan dalam Renstra maupun Renstra Perubahan 2025-2029 tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan peraturan, isu- isu ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Belitung Timur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan saat ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian baru efektif beroperasi pada tanggal 3 Januari 2017. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur terdiri dari :

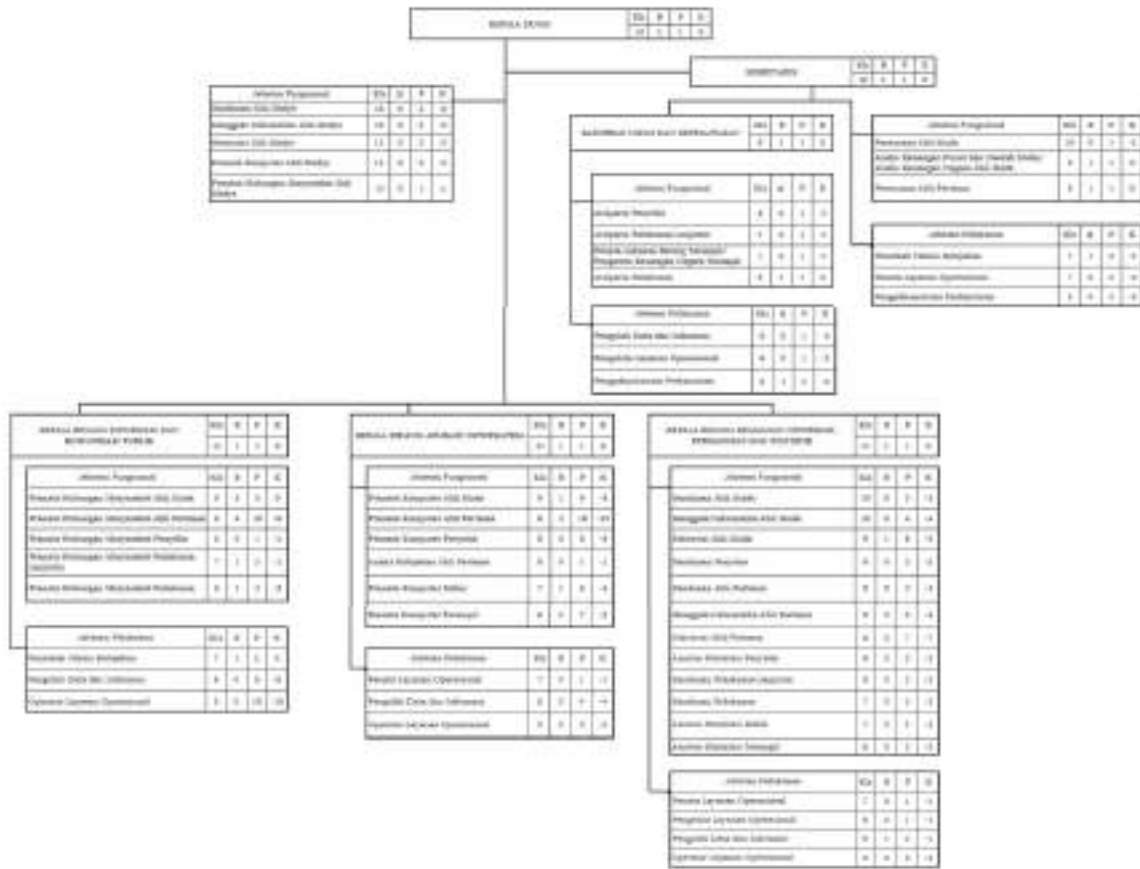
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
- d. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
- e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Belitong Timur.

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Belitong Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur seperti di bawah ini :



**Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**





1.4 Kepegawaian

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

**Tabel 1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Beltim**

N o	Unit Kerja	Jumlah	
		2024	2025
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	13	14
3	Fungsional	26	33
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	7
5	Bidang Aptika	2	2
6	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	7	5
JUMLAH		60 orang	62 orang

Sumber: Diskominfo SP Kab.Beltim, Tahun 2025

1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Beltim**

N o	Golongan	Jumlah	
		2024	2025
1	Golongan IV	4	4
2	Golongan III	22	30
3	Golongan II	5	5
4	Golongan VII	2	3
5	Golongan IX	3	8
6	Golongan V	-	12
JUMLAH		36 Orang	62 Orang

Sumber: Diskominfo SP Kab.Beltim, Tahun 2025

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi



**Tabel 1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Beltim**

No	Eselon	Jumlah	
		2024	2025
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	4
3	Eselon IV	1	1
JUMLAH		6 Orang	6 Orang

Sumber: Diskominfo SP Kab.Beltim, Tahun 2025

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kab.Belitung Timur**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2024	2025
1	S3	-	-
2	S2	3	3
3	S1 / D4	30	35
4	D3	10	11
5	SMA	17	13
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
JUMLAH		60	62

Sumber: Diskominfo SP Kab.Beltim, Tahun 2025

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kab.Belitung Timur**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2024	2025
1	PNS	31	39
2	PPPK	5	23
3	NON ASN	24	-
JUMLAH		60 Orang	62 Orang

Sumber: Diskominfo SP Kab.Beltim, Tahun 2025

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja



**Tabel 1.5. Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Belitung Timur**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2024	2025
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	5	5
4	Kendaraan Roda 2	4	4
5	Meja	73	73
6	Kursi	155	155
7	Laptop	57	57
8	PC Unit	21	21
9	Printer	30	30
10	Lemari	26	26
11	Scanner	4	4
12	UPS	12	12

Sumber: Diskominfo SP Kab.Belitim, Tahun 2025

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Belitung Timur Tahun 2025.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

1.7 Teknik Pengumpulan Data



Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan sebagai acuan (SOP Pengumpulan Data Kinerja terlampir).

SOP menggambarkan alur kerja dan bidang-bidang yang terlibat serta data yang dihasilkan. SOP ini dijalankan secara efektif dalam 3 hari 3 jam 55 menit. Namun, dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih mentah atau menunggu rilis nilai resmi dari Pemerintah Pusat serta keterbatasan waktu dari bidang-bidang terkait akibat aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan seluruh data dan bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kurang lebih 15 hari kerja.

Selanjutnya setelah dilakukan Teknik Pengumpulan data kinerja dilakukan pengukuran data kinerja sesuai dengan SOP Pengukuran Data Kinerja (terlampir). Agar dapat dilakukan evaluasi kinerja bersama tim.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Perencanaan Kinerja

1.1.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Belitung Timur, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang lebih menggambarkan tujuan akhir yang hendak dicapai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalamnya menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang ditetapkan.

1.1.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah tidak mempunyai visi misi sendiri, tetapi harus mendukung visi misi kepala daerah. Visi Kabupaten Belitung Timur : **“Belitim Nyaman dan Berkemajuan” Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri dan Berkemajuan**. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjalankan Misi 1 yaitu : **Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif**.

1.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan yang disusun diatas maka sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari 4 sasaran yaitu sebagai berikut :

- T.1.S.1 Meningkatkan akses Masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan**, ditandai dengan meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah dan ditandai dengan adanya indeks Keterbukaan informasi Publik.
- T.1.S.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital**, ditandai dengan meningkatnya indeks SPBE.
- T.1.S.2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral** ditandai dengan adanya Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
- T.1.S.3 Meningkatkan keamanannya informasi lingkungan Pemerintah Daerah**, ditandai dengan meningkatnya tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
- T.1.S.4 Meningkatkan Akuntabilitasnya Perangkat Daerah**, ditandai dengan adanya indeks Profesionalisme ASN dan meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

1.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka dipilih strategi yang tepat yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan ekosistem SPBE;
2. Perluasan Akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah;
3. Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) ;
4. Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik;
5. Peningkatan kualitas layanan informasi publik;
6. Pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan Statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
8. Pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah;
9. Percepatan penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).



Adapun kebijakan jangka menengah yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik melalui keterbukaan informasi publik;
3. Penguatan tata kelola data dan statistik sektoral;
4. Penguatan persandian dan keamanan informasi.

1.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2025-2029

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra SKPD dengan RPJMD

Visi Kabupaten Belitung Timur : **“Beltim Nyaman dan Berkemajuan”** Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri dan Berkemajuan

Misi I : **Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif.**

NO.	TUJUAN					SASARAN					ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan Renstra SKPD			Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD						
1	1	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Transparan dan Berbasis Digital dan Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik melalui keterbukaan informasi publik
							1	1	2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
							2	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Penguatan tata kelola data dan statistik sektoral
							3	1	1	Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Penguatan persandian dan keamanan informasi.
							4	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui integrasi perencanaan,

NO.	TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	
	Tujuan Renstra SKPD	Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD		
					Perangkat Daerah		Pemerintahan	penganggaran, dan kinerja. Penguatan dan Peningkatan Kompetensi ASN

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan	
1	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Transparan dan Berbasis Digital dan Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi tata Kelola informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik; 2. Peningkatan Kualitas layanan informasi publik.; 3. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat /Mitra Strategis Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menyediakan media komunikasi publik yang variatif 2. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik secara teroganisir dan efektif 3. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. 4. Membina hubungan yang baik dengan stakeholders. 5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan diseminasi informasi. 6. Menyediakan sarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang memadai.
			1	1	2	Meningkatnya penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Ekosistem SPBE; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan
						<p>pemerintahan berbasis digital</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perluasan Akses dan Peningkatan insfrastruktur digital dan Penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah. 3. Percepatan Digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan Publik dan layanan administrasi Pemerintahan). 	<p>terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan transformasi digital. 3. Mengembangkan aplikasi berbasis elektronik. 4. Meningkatkan kompetensi SDM bidang teknologi informasi . 5. Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju smart city
			2	1	1	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. 1. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan menyeluruh. 2. Mengembangkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyediaan data statistik. 3. Menyediakan metadana statistik sektoral dalam rangka mendukung Indonesia satu data. 4. Menyelenggarakan pelayanan statistik sektoral dilingkup Kabupaten
			3	1	1	<p>Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan Kegiatan Strategi Pemerintah Daerah; 2. Percepatan Penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi(SMKI) 1. Mempercepat penerapan keamanan informasi secara digital. 2. Membentuk SDM persandian yang kompeten. 3. Mewujudkan keamanan kegiatan yang bersifat strategis
			4	1	1	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Difokuskan pada penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 1. Penguatan Komitmen dan SDM; 2. Perencanaan Berorientasi Hasil,; 3. Implementasi Berbasis kinerja ; 4. Pemanfaatan Tehnologi Informasi;

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan
						2. Peningkatan Kompetensi ASN.	5. Evaluasi dan Pelaporan Berkala Inovasi dan transparansi. 1. Pendidikan Formal (Tugas belajar) 2. Pembelajaran Klasikal yaitu dengan: Bimtek, Seminar/ workshop, Kursus, sosialisasi. 3. Pembelajaran Non Klasikal (ditempat kerja/jarak jauh) dengan : E-learning, coaching dan mentoring, magang/praktek kerja,pertukaran pegawai, belajar mandiri.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5		
			lingkungan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah (Level)							
		1 1 5	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme (Nilai)	-	72	73	74	75	76	77
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,40	67	69	70	72	75	78



1.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur.

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Belitong Timur**

No	Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Ket		
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu										
1	1	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1 2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
2	1	1	2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Indeks SPBE (Nilai)	Komunikasi dan Informatika	Bidang Aplikasi Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
3	1	1	3	Meningkatnya kualitas	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Indeks Pembangunan Statistik	Statistik	Bidang Keamanan Informasi,	Laporan Hasil Pelaksanaan	



No	Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Utama SKPD (IPS) (Indeks)	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab Persandian dan Statistik	Sumber Data Kegiatan	Ket		
	Sasaran Rencana SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu									
	1	2	3	1	2	3							
4	1	1	4	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level)	Persandian	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
5	1	1	5	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Indeks Profesionalisme (Nilai) Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	



1.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan kinerja selama satu tahun berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan penyusunan rencana kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna. Penyusunan RKT ini dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kerja tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah(Persentase)	81%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 285.697.300,00
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)	Informatif (90)		
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp. 12.320.000,00
				Pelayanan Informasi Publik	Rp. 58.522.500,00
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp. 5.400.000,00
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 87.221.000,00
				Penyusunan Konten	Rp. 122.233.800,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital	Indeks SPBE (Nilai)	3,50	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.363.650,00
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp. 27.363.650,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.900.027.000,00
				Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Rp. 7.190.000,00
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan kabupaten atau Kota Cerdas	Rp. 127.500.000,00
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 666.859.000,00
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp. 5.650.000,00
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp. 1.092.828.000,00
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,6	Penyelenggaraan Statistik sektoral Di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 93.666.000,00
				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp. 93.666.000,00
	Meningkatnya Keamanan Informasi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level 2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 92.601.000,00
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.811.000,00
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 87.790.000,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	72	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.552.821.790,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.552.821.790,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 230.259.400,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.514.900,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 56.909.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 36.833.500,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 27.002.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.995.000,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 3.995.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 652.994.400,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.000.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 198.780.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 453.214.400,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 239.624.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp. 179.024.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
				Dinas Operasional atau lapangan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 40.600.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 20.000.000,00



1.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menggunakan target renstra 2021-2026, dan menggunakan target renstra 2025-2029, hal ini dikarenakan dengan ditetapkan RPJMD 2025-2029 sehingga Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada renstra 2025-2029.

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2021-2026)
Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2025**

Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025		
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu						
1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	20%
								Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	20%
2	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	83%
3	1	1	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Tingkat Kabupaten	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	1 Sistem
4	1	1	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level III
5	1	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00 nilai



**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)
Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2025**

Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025		
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu						
1	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase)	81 (Persentase)
								Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90)
2	1	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks SPBE (Nilai)	3,50 (nilai)
3	1	1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,6 (indeks)
4	1	1	Meningkatnya keamanan informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level)	2 (level)
5	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks Profesionalisme (Nilai)	72 (nilai)
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67 (nilai)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi	Kode Warna
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan	
3	BB	>70-80	Sangat Baik	
4	B	>60-70	Baik	
5	CC	>50-60	Cukup	
6	C	>30-50	Kurang	
7	D	0-30	Sangat Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renstra dan IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sendiri telah dilakukan perubahan seiring dengan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029. Setelah dilakukan kajian/evaluasi terhadap Renstra Tahun 2025-2029, maka dalam Renstra tersebut perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran serta indikator sasaran agar lebih SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Hal ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja nantinya dapat lebih dioptimalkan dalam menilai kinerja OPD dan memperbaiki program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam Renstra 2025-2029 telah ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.

**Tabel 3.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Rencana Target Tahun 2025
1.	Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase)	81%
		2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Kategori)	Informatif (90) (Kategori)
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1	Indeks SPBE (Nilai)	3,50 (Nilai)
3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6 (indeks)
4	Meningkatnya keamanan informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2 (Level)

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Rencana Target Tahun 2025
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Indeks Profesionalisme ASN	72 (Nilai)
		2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 (Nilai)

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase	81%	88,19	108,9
		2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (Kategori)	90	-	-
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1 Indeks SPBE	Nilai	3,50	4,16	118,86
3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,6	2,76*)	106,1
4	Meningkatnya keamanan informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level	2	2	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	72	82,36	114,3
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	78,50	117,2
Rata-Rata Capaian Kinerja					110,89%	

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025	Ket
1	Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	82,35%	88,19	-	Belum didapatkan data Resmi
		2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	Belum didapatkan data Resmi
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1. Indeks SPBE (Nilai)	4,16	4,16	3,12	Menggunakan nilai Indeks SPBE 2024
3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,76	2,76*	-	Peraturan Mendagri no 88 tahun 2017
4	Meningkatnya keamanan informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level III	Level 2	-	Belum didapatkan data Resmi
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	-	82,36	-	Belum didapatkan data Resmi
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,40	78,50	-	Belum didapatkan data Resmi

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak

faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitang Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitang Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitang Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.1.1 Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik terdiri dari 4 jenis yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan

terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator sasaran **Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Indeks keterbukaan Informasi Publik**, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 82,35%, dari target sebesar 80%, dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik tahun 2025 sebesar 88,19% dari target sebesar 81%. Hasil indeks ini didapatkan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan teknik pengisian questioner elektronik yang sudah tersedia pada aplikasi Sister.Beltim. questioner ini diisi oleh pengguna layanan dengan cara pengisian sendiri melalui e-survei selama periode 1 juli 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

Sementara pada pengukuran Keterbukaan Informasi Publik, masih tergantung pada hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak diikutsertakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Dimana pada tahun 2023 Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan sebagai Kabupaten Informatif dengan rentang nilai 90 sampai 100.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.1. Meningkatkan Akses Masyarakat atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Sasaran	satuan	Tahun 2024		Satuan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Satuan Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase	80%	82,35%	103%	81%	88,19%	108,9
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	-	-	-	Informasi (90)	-	-
Rata-rata kinerja								108,9%

a. Penjelasan

Pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2025 tercapai 100% kategori B (Baik). IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian IKM terhadap pelayanan informasi publik ini terkait dengan layanan penyediaan data dan informasi publik yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan secara online melalui link laman website Kabupaten Belitung Timur (belitungtimurkab.go.id) atau di link <https://survei.beltim.go.id/view/SKM2207274439>. Berdasarkan hasil survei, IKM terhadap pelayanan informasi publik sebesar 88,19 % dengan mutu layanan baik.



Gambar 2 : Tampilan Halaman Survei

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik dilaksanakan secara elektronik namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian questioner ini masih rendah. Ada beberapa factor yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah masih kurangnya informasi mengenai layanan survei IKM ini serta belum maksimalnya tata kelola pemberian pelayanan informasi. Akan tetapi saat ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah menyediakan layanan e-survei kepuasan masyarakat telah website resmi Lawang Beltim, sebagai salah satu Langkah untuk mendekatkan E-survey ke masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Selain dari itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia, seperti media sosial resmi (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube), serta melalui media non-daring pada pusat layanan PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.



Gambar 3: Tampilan website PPID Kabupaten Belitung Timur

Hambatan yang dihadapi dalam memaksimalkan capaian kinerja ini adalah keterbatasan SDM yang kompeten baik pelayanan informasi serta dalam pengolahan data untuk menjadi informasi yang akan didesiminasikan. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh kinerja program/outcome sebagai tolak ukur jangka pendek yaitu Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah. Capaian dan target indikator outcome tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Capaian	Target Capaian Kinerja
1.	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah diukur dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan yang dapat diakses}}{\text{Jumlah layanan yang dikelola}} \times 100$$

Jumlah layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat ditargetkan tersedia melalui 3 (tiga) jenis media, yaitu media sosial, media online, dan media luar ruang. Pemanfaatan ketiga media tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Media sosial dan media online dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi secara cepat dan luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara tepat waktu. Sementara itu, media luar ruang digunakan untuk memperkuat penyampaian pesan di ruang publik agar informasi lebih mudah terlihat dan diingat oleh masyarakat. Seluruh kanal informasi tersebut dikelola secara aktif dan berkelanjutan dengan pembaruan konten yang dilakukan secara rutin.

Pada tahun 2025, target ketersediaan dan pemanfaatan layanan informasi melalui ketiga jenis media tersebut telah terealisasi sebesar 100 persen sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Solusi

Untuk mendukung pencapaian target kinerja pada periode mendatang, masih diperlukan beberapa langkah penguatan dan pengembangan lebih lanjut. Salah satunya adalah peningkatan manajemen pengelolaan informasi kegiatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan PPID. Perbaikan sistem informasi perlu terus dilakukan agar informasi yang disampaikan semakin cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan. Evaluasi tersebut dapat dilaksanakan secara periodik, misalnya setiap semester, sehingga capaian kinerja dapat dipantau, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara lebih optimal.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Analisis Capaian Indikator Sasaran
1.1.1. Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2025-2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	88,19%	81%	108,9

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatkan Akses Masyarakat atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui indikator sasaran Presentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2025 mencapai target melampaui renstra sebesar 88,19%. Upaya peningkatan pelayanan informasi publik akan dievaluasi secara berkala agar dapat ditingkatkan dan dilakukan perbaikan pelayanan ke depannya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.1, Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan adalah: **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dijabarkan melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain:**

- a. Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik
- b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- c. Penyusunan Konten
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sasaran 1 : 1.1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik saat ini sudah menjadi keharusan. Dalam era digital, pemerintah juga harus mulai berbenah dengan mengubah pola kerja dan cara melayani masyarakat menjadi berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 166,67% dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	Persen	15	24,24	161,62	20	33,33	166,67
2	Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	Persen	15	24,24	161,62	20	33,33	166,67
3	Indeks SPBE	nilai	2,90	4,16	143,45	3,50	4,16	118,85
	Rata - Rata Kinerja				155,56			150,73

a. Penjelasan

Berdasarkan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2021-2026, DiskominfoSP telah menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi. Indikator Persentase Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Persentase Digitalisasi Layanan Publik masing-masing mencatatkan realisasi sebesar 33,33%, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%.

Capaian positif ini mengindikasikan bahwa fondasi infrastruktur dan ketersediaan aplikasi layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitang Timur telah terbangun dengan baik. Namun, transformasi digital bukan sekadar tentang jumlah aplikasi yang dibangun, melainkan bagaimana sistem tersebut terintegrasi dan memberikan dampak nyata.

Oleh karena itu, menyadari bahwa paradigma pelayanan publik kini menuntut efisiensi, keterpaduan, dan orientasi pada pengguna (*citizen-centric*), fokus pengukuran kinerja DiskominfoSP akan bertransformasi. Keberhasilan pemenuhan target digitalisasi layanan di atas menjadi batu loncatan untuk beralih ke indikator yang lebih komprehensif, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator SPBE ini tidak hanya mengukur ketersediaan layanan digital semata, tetapi juga menilai tingkat kematangan, keterpaduan proses bisnis, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Untuk memastikan akuntabilitas dan objektivitas dalam pengukuran kinerja tersebut, realisasi capaian dihitung berdasarkan metodologi dan definisi

operasional yang telah ditetapkan. Adapun rincian formulasi perhitungan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Realisasi indikator ini diukur dengan rumusan sebagai berikut :

a. Persentase Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan :

$$\frac{\text{Jumlah digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$$

b. Persentase Digitalisasi layanan publik :

$$\frac{\text{Jumlah digitalisasi layanan publik}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100$$

c. Nilai Indeks SPBE :

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Sepanjang tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSP) berperan aktif dalam akselerasi digitalisasi daerah. Selain mengembangkan sistem aplikasi yang dikelola secara mandiri, DiskominfoSP juga memfasilitasi Perangkat Daerah lain dalam membangun berbagai inovasi layanan digital, baik untuk kebutuhan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Adapun layanan digital yang dikembangkan antara lain :

1. TIMOER

Aplikasi TIMOER merupakan inovasi platform publikasi digital yang dikembangkan oleh DiskominfoSP Kabupaten Belitong Timur. Aplikasi ini mentransformasi **Majalah Timoer** yang terbit rutin setiap bulan ke dalam format digital yang modern, interaktif, dan mudah diakses. Tujuannya adalah memperluas jangkauan informasi terkait progres pembangunan, kebijakan publik, dan potensi daerah tanpa terkendala batasan distribusi fisik. Fitur utamanya mencakup E-Magazine Reader yang nyaman, arsip edisi bulanan lengkap, kategorisasi konten, statistik pembaca, serta terintegrasi dengan portal utama Lawang Beltim.

Aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui tautan <https://timoer.beltim.go.id>.



Gambar 4. Aplikasi Timoer

2. APLIKASI NYAMAN KERJE

Aplikasi Nyamankerje merupakan inovasi strategis Pemerintah Kabupaten Belitong Timur yang lahir dari sinergi antara DiskominfoSP dan Disnakerkopukm. Platform ini dirancang untuk mendigitalisasi ekosistem ketenagakerjaan daerah,

berfungsi sebagai jembatan digital yang menghubungkan pencari kerja (job seekers) dengan pemberi kerja (employers) secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Kehadiran aplikasi ini bukan sekadar memindahkan proses manual ke digital, melainkan bentuk nyata implementasi Smart Governance dalam menekan angka pengangguran. Dengan mengintegrasikan data lowongan kerja, pelatihan vokasi, dan program pemagangan, Nyamankerje mengeliminasi hambatan geografis dan birokrasi, memberikan kesetaraan akses informasi bagi seluruh masyarakat Belitung Timur hingga ke pelosok desa.

Secara makro, platform ini memungkinkan pemerintah daerah memetakan profil dan kualifikasi SDM lokal untuk disandingkan dengan kebutuhan riil industri (link and match). Hal ini menjadi basis data krusial dalam merumuskan kebijakan pelatihan kerja yang tepat sasaran, sekaligus meningkatkan iklim investasi daerah dengan menyediakan akses terhadap tenaga kerja lokal yang kompeten melalui kanal resmi pemerintah. Aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui tautan <https://nyamankerje.beltim.go.id>.



Gambar 5. Aplikasi Nyaman Kerje

3. LAWANG BELTIM

Portal Lawang Beltim merupakan representasi wajah digital Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dirancang sebagai layanan satu pintu (one-stop service). Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2026, platform ini telah mengalami

transformasi signifikan; dari sekadar situs informasi menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi. Hal ini selaras dengan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berhasil meraih predikat "Sangat Baik".

Eksistensi aplikasi ini mengejawantahkan filosofi "Lawang"—yang bermakna pintu—sebagai akses utama bagi masyarakat untuk menjangkau berbagai layanan publik tanpa hambatan birokrasi. Integrasi berbagai fitur layanan di dalamnya menegaskan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengadopsi teknologi digital untuk optimalisasi pelayanan.

Memasuki tahun 2026, Lawang Beltim terus berevolusi melalui pengembangan antarmuka yang responsif serta penguatan integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, Lawang Beltim kini berfungsi bukan sekadar sebagai etalase informasi digital, melainkan sebagai instrumen strategis yang meningkatkan efisiensi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Belitong Timur. Aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui tautan <https://beltim.go.id>.



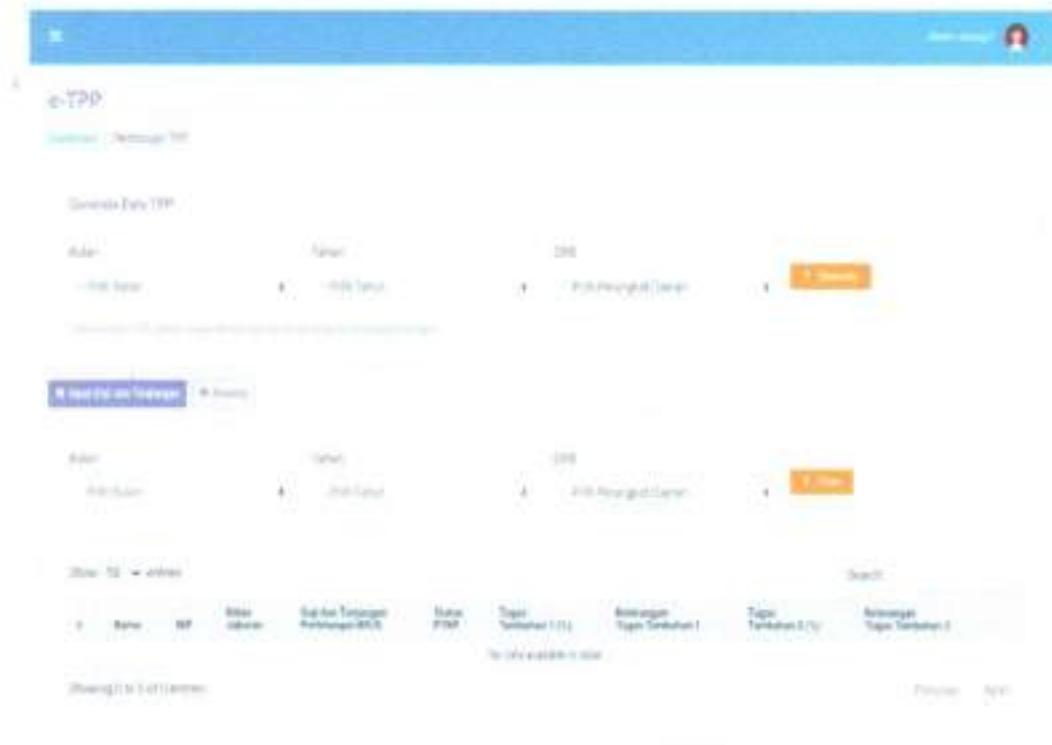
Gambar 6. Tampilan Lawang Beltim

4. e-TPP

Aplikasi **e-TPP** merupakan salah satu modul dalam ekosistem *Lawang Beltim*. Dikembangkan oleh **Diskominfo SP** atas permintaan **BPKPD Belitong Timur**. Aplikasi **e-TPP** hadir sebagai solusi cerdas dalam menjawab tantangan

kompleksitas perhitungan tunjangan kinerja bagi ribuan ASN di Belitung Timur. Dengan mengintegrasikan data kehadiran serta capaian kinerja harian yang ada pada Aplikasi SILAGAK secara otomatis, aplikasi ini meminimalisir risiko kesalahan manusia (*human error*) dan subjektivitas dalam penentuan besaran tambahan penghasilan. Hal ini menciptakan standar baru yang lebih adil, di mana setiap rupiah yang diterima pegawai berkorelasi langsung dengan kedisiplinan dan produktivitas yang terekam dalam sistem. Keberadaan e-TPP memastikan bahwa anggaran daerah yang dikelola oleh BPKPD disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kolaborasi antara DiskominfoSP dan BPKPD dalam membangun aplikasi ini menunjukkan sinergi yang kuat menuju digitalisasi birokrasi yang efektif. e-TPP tidak hanya mempermudah urusan administratif bagi bendahara pengeluaran di setiap OPD, tetapi juga memberikan ketenangan bagi pegawai karena prosesnya yang transparan dan dapat dipantau secara mandiri. Sebagai bagian dari portal Lawang Beltim, e-TPP menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di Belitung Timur telah menyentuh jantung reformasi birokrasi, yaitu peningkatan integritas melalui sistem remunerasi yang berbasis pada data riil dan performa terukur. Aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui tautan <https://beltim.go.id>.



Gambar 7. Aplikasi e-TPP

5. SIMPEL

Aplikasi **SIMPEL** (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan) yang dapat diakses pada tautan <https://simpler.belitim.go.id> merupakan aplikasi yang dikelola oleh **BKPSDM Belitung Timur**. Aplikasi SIMPEL hadir sebagai solusi atas birokrasi konvensional yang seringkali memakan waktu, terutama dalam pengurusan kenaikan pangkat, pencantuman gelar, hingga pemutakhiran data mandiri. Dengan sistem ini, berkas fisik yang menumpuk telah digantikan oleh dokumen digital yang terintegrasi, memungkinkan proses verifikasi berjalan jauh lebih cepat dan akurat. ASN tidak perlu lagi bolak-balik membawa map fisik ke kantor BKPSDM; cukup dengan mengunggah dokumen melalui portal SIMPEL, proses administrasi dapat dipantau secara *real-time*. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan meminimalisir hambatan jarak maupun waktu.

Dengan adanya aplikasi ini, tercipta transparansi dan kepastian layanan bagi para aparatur, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan moral kerja. Sebagai bagian integral dari ekosistem digital Belitung Timur, SIMPEL

membuktikan bahwa inovasi teknologi mampu mengubah wajah pelayanan internal pemerintah menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berbasis data.



Gambar 8. Aplikasi **SIMPEL**

6. CMS WEBSITE OPD

Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan manifestasi digital dari unit kerja pemerintah yang berfungsi secara spesifik dan mendalam. Dalam ekosistem digital daerah, jika Lawang Beltim berperan sebagai portal induk (main gate), maka website OPD seperti <https://kominfo.beltim.go.id> berfungsi sebagai "kantor layanan sektoral" yang menyajikan informasi detail mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta capaian kinerja spesifik instansi.

Sebagai saluran komunikasi resmi, website OPD memegang peranan vital sebagai rujukan utama dalam mendiseminasi kebijakan teknis dan data sektoral. Publikasi rutin berupa rilis berita, pengumuman resmi, hingga data statistik sektoral menjadi instrumen validasi untuk menangkal disinformasi di ruang publik. Tingkat keaktifan pembaruan konten pada laman ini menjadi indikator kinerja transparansi yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dari perspektif tata kelola, website OPD merupakan implementasi nyata Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Integrasi antara substansi informasi yang akuntabel dengan antarmuka yang ramah pengguna menjadikan website OPD

ujung tombak dalam membangun kepercayaan publik (public trust) di era digital. CMS Website OPD ini pun sudah terintegrasi dengan Lawang Belitim.



Gambar 9. CMS WEBSITE OPD

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kinerja pengembangan digitalisasi daerah pada tahun 2025 mencatatkan hasil yang melampaui ekspektasi dengan capaian 166,67%. Keberhasilan ini dibuktikan melalui pengembangan 3 (tiga) aplikasi administrasi pemerintahan dan 3 (tiga) aplikasi layanan publik baru. Angka ini menegaskan bahwa dari sisi digitalisasi layanan, target telah terpenuhi dengan sangat baik.

Kendati demikian, pencapaian kuantitatif ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kedalaman kualitas layanan. Masih terdapat beberapa faktor pendukung strategis yang perlu dioptimalisasi agar aplikasi-aplikasi tersebut dapat beroperasi dalam satu ekosistem yang padu.

Dalam konteks inilah indikator Indeks SPBE menjadi relevan sebagai ukuran kematangan sistem. Meskipun Kabupaten Belitong Timur tidak menjadi lokus evaluasi dan pemantauan SPBE tahun 2025, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen menjaga standar kualitas layanan dengan mengacu pada hasil evaluasi tahun 2024 yang meraih predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut menjadi landasan kinerja tahun berjalan, sekaligus pengingat untuk terus menyempurnakan aspek tata kelola kedepannya.

Tabel. Nilai Indeks SPBE Berdasarkan Domain

Domain SPBE	Tahun 2024	Tahun 2025
Kebijakan	4,00	4,00
Tata Kelola	4,20	4,20
Manajemen	3,09	3,09
Layanan	4,57	4,57
Indeks SPBE	4,16	4,16

Capaian kinerja untuk indikator Indeks SPBE pada tahun 2024 adalah sebesar 4,16 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Nilai Indeks SPBE tersebut masuk dalam predikat **Sangat Baik**. Untuk kategori predikat Indeks SPBE dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 -5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Kemudian untuk domain dan aspek serta bobot penilaian yang menghasilkan nilai Indeks SPBE terdiri dari:

- a. Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (13,00%)
 - Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata kelola SPBE (13,00%)
- b. Domain 2 – Tata Kelola SPBE (25,00%)
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis (10,00%)
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (10,00%)
 - Aspek 4 – Penyelenggara SPBE (5,00%)
- c. Domain 3 - Manajemen SPBE (16,50%)
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (12,00%)
 - Aspek 6 – Pelaksanaan Audit SPBE (4,50%)

- d. Domain 4 – Layanan SPBE (45,50%)
- Aspek 6 – Layanan Adm. Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,50%)
 - Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik (18,00%)

Berdasarkan analisis struktur penilaian, Domain Layanan SPBE dan Domain Tata Kelola SPBE memiliki bobot kontribusi terbesar terhadap nilai akhir indeks. Oleh karena itu, strategi utama untuk mendongkrak Indeks SPBE Kabupaten Belitang Timur difokuskan pada akselerasi digitalisasi, baik pada sektor layanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Peningkatan kualitas pada kedua domain ini akan berdampak signifikan (leverage) terhadap capaian indeks secara keseluruhan.

Sebagai turunan dari strategi tersebut, capaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator outcome jangka pendek, yaitu Tingkat Kematangan Aspek TIK. Indikator yang berada dalam lingkup Domain 2 (Tata Kelola SPBE) ini dipilih sebagai tolok ukur kinerja utama karena merepresentasikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) inti DiskominfoSP dalam membangun fondasi teknologi pemerintahan.

Adapun rincian capaian dan target untuk indikator outcome tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)
1.	Tingkat Kematangan Aspek TIK/ Teknologi Digital	3,0	5,0	166,67
Rata-Rata Capaian Kinerja		166,67		

Perhitungan indikator tersebut diukur dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE} + \text{Tingkat Kematangan Pusat Data} + \text{Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah} + \text{Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah}}{4}$$

Dari hasil penilaian indeks SPBE 2024 didapatkan nilai tingkat kematangan sebagai berikut:

1	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

Kriteria tingkat kematangan dari setiap aspek tersebut sebagai berikut:

1. Rintisan
2. Terkelola
3. Terdefinisi
4. Terpadu dan Terukur
5. Optimum

Dari kriteria tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kematangan pada Aspek TIK dalam Domain Tata Kelola dalam Indeks SPBE saat ini sudah mencapai tingkat kematangan tertinggi (optimum) dan harus dipertahankan pada tahun berikutnya. Namun masih ada beberapa faktor lainnya yang perlu ditingkatkan dalam Indeks SPBE untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih baik yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola SPBE: Perlunya reviu mendalam terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, serta melakukan inovasi proses bisnis agar lebih terintegrasi.
2. Optimalisasi Manajemen SPBE: Fokus perbaikan pada aspek manajemen keamanan informasi, manajemen perubahan, dan peningkatan kompetensi SDM, serta pelaksanaan audit keamanan SPBE yang lebih komprehensif.
3. Pemanfaatan Tools Arsitektur: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIA-SPBE untuk penyusunan Arsitektur SPBE yang lebih berkualitas.
4. Ekstensifikasi Layanan: Memaksimalkan cakupan dan kualitas pelaksanaan layanan SPBE, khususnya pada layanan publik berbasis elektronik agar lebih berdampak bagi masyarakat.
5. Peningkatan Kapabilitas SDM: Mengatasi keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK melalui pelatihan intensif dan sertifikasi.

c. Solusi

Guna mengakselerasi pencapaian target kinerja serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di tahun mendatang, telah dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kolaborasi Ekosistem SPBE: Mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan SPBE, khususnya dalam proses reviu Arsitektur SPBE dan pemutakhiran Peta Rencana SPBE agar lebih terintegrasi.
2. Optimalisasi Tata Kelola dan Manajemen: Melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek tata kelola dan manajemen SPBE yang teridentifikasi belum optimal, guna memastikan standar operasional prosedur berjalan efektif.
3. Peningkatan Kualitas Layanan & Kompetensi SDM: Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik melalui percepatan digitalisasi proses bisnis. Upaya ini dibarengi dengan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis TIK yang intensif.
4. Pengembangan Infrastruktur TIK: Meningkatkan kapasitas dan jangkauan infrastruktur SPBE untuk menjamin keandalan serta kemudahan akses layanan digital bagi masyarakat.
5. Penguatan Koordinasi dan Pengawasan: Mengintensifkan fungsi koordinasi internal Tim Koordinasi SPBE serta memperketat mekanisme pengawasan dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Analisis Capaian Indikator Sasaran

**1.1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2025-2029**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,50	118,85

Berdasarkan data pada diatas, menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga tahun 2025, realisasi Indeks SPBE tercatat mencapai angka 4,16. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 sebesar 3,50.

Secara akumulatif, tingkat capaian kinerja sasaran ini menyentuh angka 118,85% (Kategori: Sangat Memuaskan/Melampaui Target). Pencapaian ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan dengan baik. Kendati demikian, upaya evaluasi secara berkala akan terus dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan digital tetap relevan dan semakin baik di masa depan.

Keberhasilan melampaui target kinerja tersebut merupakan akumulasi dari pelaksanaan berbagai intervensi strategis. Secara operasional, dukungan riil terhadap pencapaian indikator tersebut diwujudkan melalui Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjang capaian Sasaran 1.1.2. **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital**, antara lain:

A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan antara lain:

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.

B. Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
4. Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
5. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Sasaran 2 : 1.1.3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 100% dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Targ et	Realis asi		Targ et	Realis asi	
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Nilai	Ada	Ada	100% Sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	-	-	2,76	2,6	2,76*	106,2
Rata-rata kinerja								106,2

Terjadi perubahan indikator sasaran kinerja untuk sasaran ini pada Tahun 2025, di mana berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 indikatornya masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DiskominfoSP Tahun 2021-2026 yaitu Sistem data dan statistik yang terintegrasi, namun di PK Perubahan Tahun 2025 diubah menjadi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menyesuaikan dengan Renstra DiskominfoSP Tahun 2025-2029.

1. Indikator sesuai PK 2025: Sistem data dan statistik yang terintegrasi

a. Penjelasan

Sistem data dan statistik yang terintegrasi ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana sistem tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip pengelolaan SDI yaitu:

1. Memenuhi standar data;
2. Memiliki metadata;
3. Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
4. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Sistem integrasi (*integrated system*) adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya.

Konsep Integrasi sistem adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi Input sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi. Hal ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh unit kerjanya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Integrasi dari sebuah sistem diperlukan karena:

1. Adanya kebutuhan konstituen untuk bekerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam suatu pemerintahan.

2. Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap OPD yang saling terkait, sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lain.
3. Dapat memungkinkan penyediaan *realtime* pengaksesan data.
4. Mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, mengatur penempatan data untuk kinerja.

Realisasi indikator ini diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Keberadaan sistem data dan statistik yang terintegrasi [Ada / Tidak Ada]

Sejak tahun 2021, Diskominfo Belitung Timur telah membangun Sistem Data dan Statistik Terintegrasi yang bisa diakses melalui: <https://sdi.belitim.go.id/>. Selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan pengembangan sistem lebih lanjut dengan mengakomodasi kegiatan statistik sektoral yang cara pengumpulan datanya dilakukan melalui survei. Sistem survei statistik sektoral terintegrasi ini bisa diakses melalui halaman <https://sdi.belitim.go.id/> menu survei, atau bisa secara langsung melalui <https://survei.belitim.go.id/>. Berikutnya pada tahun 2023 dilakukan pengembangan Sistem Data dan Statistik Terintegrasi dalam format *mobile web application* yang dinamai Mentudong Beltim yang bisa diakses melalui:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibelitim>



Gambar 10: Tampilan Antar Muka Sistem Data dan Statistik Terintegrasi dalam format *web-based application* <https://sdi.belitim.go.id/>



Gambar 11: Tampilan Antar Muka Sistem Survei Statistik Sektoral Terintegrasi
<https://survei.belitim.go.id/>



Gambar 12: Tampilan Antar Muka Sistem Data dan Statistik Terintegrasi dalam format mobile-based application
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.scibeltim>

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2024, target yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi di <https://sdi.belitim.go.id/>, <https://survei.belitim.go.id/>, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibelitim> namun prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI pada sistem tersebut belum terlaksana sepenuhnya, terutama dari sisi konten/isi sistem. Adapun analisis capaian kinerja dari setiap prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Standar Data

Standar Data maksudnya adalah Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data sesuai standar data yang ditetapkan oleh pembina data, yang meliputi: konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Prinsip Standar Data telah dikerjakan pada Tahun 2023, namun baru standar data untuk kegiatan statistik sektoral dengan cara survei.

2. Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Prinsip Metadata telah dikerjakan pada Tahun 2023, namun baru metadata untuk kegiatan statistik sektoral dengan cara survei.

3. Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. SDI Kabupaten Belitung Timur (<https://sdi.belitim.go.id>) sebagai suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi telah diupayakan untuk berbagai pakai dengan sistem data dan statistik BPS Belitung Timur (<https://belitungtimurkab.bps.go.id>) melalui penggunaan Web API BPS (<https://webapi.bps.go.id/>). Begitu juga penerapan SDI melalui *mobile-web application* yaitu aplikasi Mentudong Belitung (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibelitim>) yang dikembangkan pada 2023 juga telah menerapkan prinsip interoperabilitas melalui pemanfaatan Web API BPS

(<https://webapi.bps.go.id/>). Meskipun prinsip interoperabilitas data telah tercapai, namun perlu dikembangkan lebih lanjut agar interoperabilitas ini mencakup juga seluruh layanan statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Belitung Timur, karena layanan yang baru terintegrasi dengan BPS baru di Publikasi dan Tabel Dinas Statistik Dasar BPS.



Gambar 13: Tampilan Prinsip SDI (Interoperabilitas Data) pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Belitung Timur
(<https://sdi.belitim.go.id/bps/>)

4. Kode Referensi dan Data Induk

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.



Gambar 14: Tampilan Prinsip SDI (Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi/Data Induk) pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Belitung Timur

c. Solusi

Meskipun indikator ini telah tercapai dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi di Belitung Timur (<https://sdi.beltim.go.id/>, <https://survei.beltim.go.id/>, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibeltim>), namun prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI pada sistem tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator ini, kedepannya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan terus melakukan pembenahan, perbaikan, dan *upgrading* agar sistem statistik sektoral terintegrasi ini bisa semakin memenuhi prinsip dan azas penyelenggaraan SDI dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2. Indikator sesuai PK 2025 Perubahan: Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

a. Penjelasan

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan predikat yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel
Predikat Nilai IPS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator:

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Dasar Data Informatika	Standar Data Statistik		Metastata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi Statistik		
	Standar Data Statistik		Metastata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi		Aktualitas & Kelengkapan Waktu		Aksesibilitas		Keberhasilan & Kompatibilitas	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Kelengkapan Data	Keberhasilan Data	Akses Muka Penerimaan	Format Data	Keberhasilan Data	Kompatibilitas
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemrosesan Data		Penyimpanan Data		
	Perencanaan Kebutuhan	Desain Statistik	Persiapan sumber	Proses Pengumpulan/Akses		Pengolahan	Analisis	Distribusi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Meliputi dan Kapasitas		Pengembangan Statistik			
	Transparansi Informasi	Integritas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	ICM Statistik	SDM Manajemen Data	Koefisien Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kelengkapan Perencanaan Statistik	Tingkat Wawasan
Sistem Informatika	Pemanfaatan Data Statistik			Pengujian Kegiatan Statistik			Pergiatan SDN Berkomputer			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektor	Statistik dan Layanan Data	Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Penerapan Pengembangan Statistik	Penerbitan Data	Penerbitan Rg Data	

Catatan:

 Domain
 Aspek
 Indikator

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2025, target IPS yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra DiskominfoSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 adalah 2,6, dan dengan realisasi 2,76 (karena IPS diukur setiap 2 tahun sekali dan dimulai dari tahun 2024, maka nilai IPS 2025 didekati dengan nilai IPS 2024 yaitu 2,76 dengan kategori Baik), yang artinya sudah tercapai 100%.

Adapun rincian nilai IPS Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel
Nilai IPS dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,58
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,91
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,56
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,76

Tabel
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	3,00
Penyebarnyaan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	3,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,75
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,66

Namun demikian, masih ada beberapa domain yang perlu ditingkatkan karena nilainya dibawah nilai rata-rata IPS (2,76) yaitu: Domain Kualitas Data (2,58), dan Domain Statistik Nasional (2,56).

Sedangkan Aspek yang perlu ditingkatkan adalah: Aspek Keterbandingan dan Konsistensi (2,00), dan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan (1,66).

c. Solusi

Meskipun indikator ini telah tercapai dengan kategori Baik sesuai dengan target Renstra. Beberapa yang bisa diupayakan untuk meningkatkan nilai IPS Kabupaten Belitung Timur ke depannya adalah dengan menyelenggarakan Big Data untuk mendukung Domain Statistik Nasional, Aspek Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan yang nilainya masih kecil yaitu 1,66.

Penyelenggaraan Big Data ini tengah diupayakan melalui penerapan visualisasi data melalui aplikasi Tableau yang sedang dikembangkan melalui <https://sdi.belitim.go.id/insight>.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra DiskominfoSP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Analisis Capaian Indikator Sasaran

1.1.3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2025-2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,76	2,6	106,2

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi dari indikator sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sampai dengan tahun 2025 tercapai 2,76 indeks dari target di akhir Renstra sebesar 2,6 indeks. Namun tetap ada catatan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut kedepannya, terutama dari penyelenggaraan statistik sektoral sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI yang harus terpenuhi sesuai dengan Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral adalah:

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui kegiatan 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

Sasaran 3 : 1.1.4 Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.4 **Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah** dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 85,43%. Capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

1.1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Level)	Level	Level III	Level III	85,43 % (551/645)	-	-	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level)	Level	-	-	-	Level 2	Level 2	60,02% (551/918)
	Rata-rata kinerja							60,02%

Terjadi perubahan indikator sasaran kinerja untuk sasaran ini pada Tahun 2025, di mana berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 indikatornya masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DiskominfoSP Tahun 2021-2026 yaitu Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Level), namun di PK Perubahan Tahun 2025 diubah menjadi Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level) yang menyesuaikan dengan Renstra

DiskominfoSP Tahun 2025-2029. Namun sebenarnya kedua indikator ini sama-sama dapat didekati dengan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang merupakan ukuran tingkat kesiapan (*readiness*) dan tingkat kematangan (*maturity*) penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah.

Untuk Tahun 2025, pengukuran Indeks KAMI 2025 Kabupaten Belitung Timur baru hanya dilakukan melalui *self-assessment*, sehingga didekati dengan nilai Indeks KAMI Tahun 2024 yang sudah diverifikasi oleh pihak BSSN langsung, dikarenakan:

1. Ada masa transisi permutakhiran instrumen pengukuran Indeks KAMI dari Indeks KAMI Versi 4.2 (yang diadaptasi dari ISO/IEC 27001:2013) menjadi Indeks KAMI 5.0 (yang diadaptasi dari ISO/IEC 27001: 2022), yang menyebabkan area pengukuran keamanan informasi bertambah dengan munculnya area perlindungan data pribadi, dan area penggunaan penyimpanan awan (Cloud Storage) sehingga belum cukup bukti/*evidence* untuk diajukan tahap verifikasi Indeks KAMI melalui BSSN.
2. Adanya kebijakan efisiensi anggaran beberapa tahap sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengakibatkan belanja tenaga verifikator BSSN terpangkas, sehingga pihak BSSN tidak berkesempatan hadir di Belitung Timur secara langsung untuk melakukan verifikasi hasil *self-assessment* Indeks KAMI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

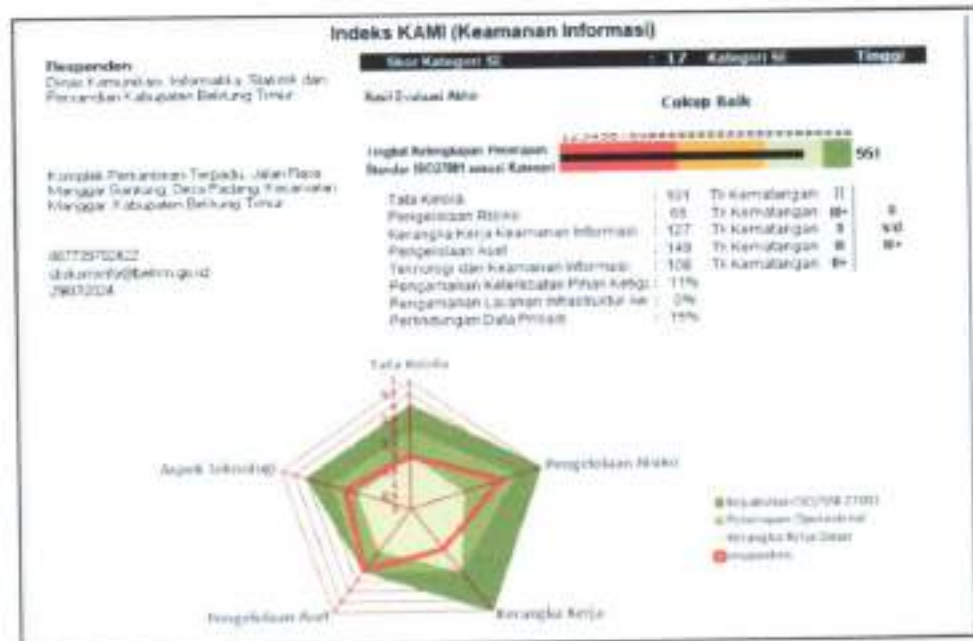
a. Penjelasan

Dari tabel evaluasi di atas bahwa di tahun 2025 kegiatan verifikasi Indeks KAMI sudah dilakukan oleh Verifikator dari Badan Siber dan Sandi Negara didekati dengan nilai Indeks KAMI 2024 (551) dengan Capaian Kinerja bernilai 60,02% (551/918) artinya terjadi penurunan nilai yang didapatkan pada tahun sebelumnya yaitu 85,43% hal ini disebabkan perubahan instrumen pengukuran Indeks KAMI dari Indeks KAMI Versi 4.2 (yang diadaptasi dari ISO/IEC 27001:2013) menjadi Indeks KAMI 5.0 (yang diadaptasi dari ISO/IEC 27001: 2022), yang menyebabkan area pengukuran keamanan informasi bertambah dengan munculnya area perlindungan data pribadi, dan area penggunaan penyimpanan awan

(Cloud Storage) sehingga nilai maksimal sebagai nilai pembagi capaian berubah dari 645 menjadi 918. Angka capaian 551 ini masih masuk ke dalam kategori Indeks KAMI dengan kategori level 2.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada urusan Persandian, alat evaluasi yang digunakan untuk menentukan nilai Indikator sasaran adalah Indeks KAMI (ISO 27001). Indeks Keamanan Informasi adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.



Gambar 15: Tampilan alat evaluasi Indeks KAMI

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk

mengelola keamanan informasi diseluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- Pengelolaan Aset Informasi, dan
- Tekogi dan Keamanan Informasi
- Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Realisasi indikator program diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Presentase tingkat keamanan informasi Pemerintah adalah :

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan Informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran 3 tersebut didukung oleh kinerja program/*outcome* sebagai tolok ukur jangka pendek yaitu Tingkat kematangan keamanan Informasi. Capaian dan target indikator *outcome* tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Tingkat Kesiapan Pengamanan informasi Pemerintah Daerah (Level)	Level 2	Level 2	60,02%

Perhitungan indikator tersebut diukur dengan menggunakan ISO/IEC 27001:2013 yaitu Tingkat kematangan didefinisikan sebagai:

Level I : Kondisi awal

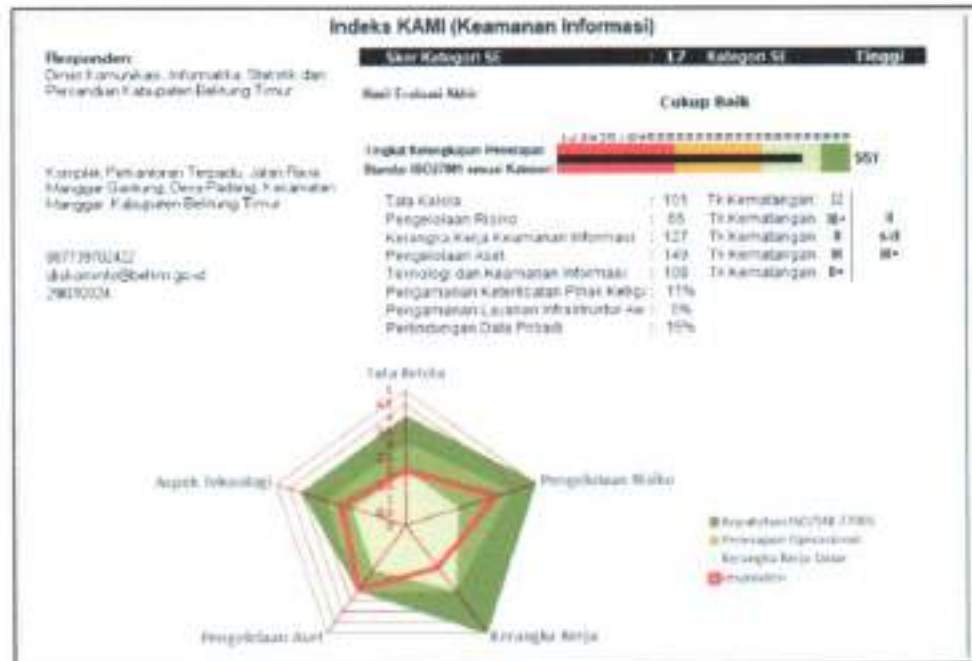
Level II : Penerapan Kerangka Dasar

Level III: Terdefinisi dan Konsisten

Level IV: Terkelola dan Terukur

Level V : Optimal

Dari gambaran diatas dapat dilihat lebih jelas yang ada pada gambar dibawah ini



Gambar 16: Tampilan Pengukuran Indeks KAMI

c. Solusi

Untuk mengetahui secara akurat terkait penilaian Indeks KAMI, maka sejak tahun 2023 sampai dengan laporan ini disusun penilaian Indeks Kami sudah dilakukan oleh verifikator dari Badan Siber dan Sandi Negara RI, namun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi anggaran dan transisi pemutakhiran instrumen pengukuran Indeks KAMI dari versi 4.2 ke versi 5.0, sehingga belum bisa dilakukan verifikasi terhadap hasil *self-assessment* Indeks KAMI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berkenaan dengan hal di atas, maka untuk tahun selanjutnya, terhadap hasil *self-assessment* yang telah dilakukan tersebut, agar dapat diajukan proses verifikasi ke BSSN.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Analisis Capaian Indikator Sasaran
1.1.4 Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah
(Level)
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2025-
2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level)	Level	Level 2	Level 2	60,02%

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi dari indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Level) realisasi akumulasi di Tahun 2025 telah mencapai target sesuai periode renstra 2025-2029. Namun demikian nilai ini masih nilai pendekatan hasil pengukuran 2024 yang telah tervalidasi dan resmi karena dilaksanakan melalui penilaian dengan mengundang tim dari Badan Siber dan Sandi Negara yang memvalidasi Nilai Indeks KAMI, sehingga untuk periode berikutnya perlu dianggarkan untuk memfasilitasi kehadiran verifikator indeks KAMI dari BSSN.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, terdiri dari 1 kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut yaitu:

- 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 4 : 1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Perencanaan Kinerja,
2. Pengukuran Kinerja,
3. Pelaporan Kinerja,
4. Evaluasi Internal; dan
5. Capaian Kinerja.

Sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.5 **Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah** dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, yaitu indeks profesionalisme ASN dan nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.13. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	-	-	-	72	82,36	114,3
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00	78,40	105	67	78,50	117,2
	Rata-rata kinerja							231,5%

a. Penjelasan

Dari tabel evaluasi di atas bahwa di tahun 2025 untuk indikator sasaran indeks Profesionalisme ASN mengacu pada renstra baru 2025-2029 dengan target 72 nilai mendapatkan capaian kinerja senilai 82,36, dengan Kategori Tingkat IP ASN Tinggi. Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah ukuran kuantitatif 0-100 untuk menilai kualitas ASN berdasarkan empat dimensi: kompetensi (40%), kinerja (30%), kualifikasi pendidikan (25%), dan kedisiplinan (5%). IP ASN bertujuan untuk standardisasi profesionalisme guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sering dikaitkan dengan perhitungan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

Komponen Penilaian Indeks Profesionalisme ASN:

- Kompetensi 40%): Pelatihan, diklat fungsional/teknis, dan pengembangan kompetensi mandiri.
- Kinerja (30%): Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau prestasi kerja.
- Kualifikasi (25%) : Kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan
- Kedisiplinan (5%): Kepatuhan terhadap aturan dan tidak adanya hukuman disiplin.

Kategori Tingkat IP ASN:

- Sangat Tinggi: 91-100
- Tinggi: 81-90
- Sedang: 71-80
- Rendah: 61-70
- Sangat Rendah: < 60

Realisasi indikator ini diukur dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator

$$\begin{aligned}IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\ &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \\ IP_1 &= W_{1j} \cdot R_{1j} \\ IP_2 &= W_{2k} \cdot R_{2k} \\ IP_3 &= W_{3l} \cdot R_{3l} \\ IP_4 &= W_{4m} \cdot R_{4m}\end{aligned}$$

Sedangkan Untuk indikator SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 78,50 dengan kategori BB. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Capaian Kinerja untuk indikator SAKIP Perangkat Daerah ada peningkatan nilai dari tahun 2024 dengan realisasi 78,40. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan meningkatkan kinerja sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025 ini merupakan kali ketiga bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan evaluasi internal dari Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dan mendapatkan juara 1 dengan nilai akuntabilitas Kinerja 78,50 BB dari penilaian seluruh opd yang berjumlah 33 OPD yang ada pada Kabupaten Belitung Timur.

Hasil Penilaian Perencanaan kinerja didapatkan dari :

- a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, seluruh kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat Kebijakan Nasional;
- b. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, namun belum mengaktualisasikan secara keseluruhan dalam pedoman teknis perencanaan kinerja;
- c. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), seluruh kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional;
- d. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,

menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);

- e. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, sebagian besar kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah terpenuhi (>75%-100%);
- f. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai.

Hasil evaluasi Penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (.0%-25%);
- b. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sudah memiliki Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja yaitu Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 23 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berbasis Kinerja pada Perangkat Daerah;
- c. Pengukuran Kinerja telah menjadi Kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sebagian besar kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah terpenuhi (>75%-100%);
- d. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi SILAGAK yang digunakan untuk mengukur kinerja dari ASN.

Hasil Penilaian Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Belitong Timur yang mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pedoman

- Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh Sumber Daya yang memadai yang memiliki sertifikat dan pengetahuan tentang evaluasi AKIP.
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
 - Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh APIP.

Realisasi indikator program diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Presentase tingkat keamanan informasi Pemerintah adalah :

IKM = rata-rata terboboti dari 9 unsur layanan publik:

- Persyaratan;
- Sistem, Mekanisme, Prosedur;
- Waktu Penyelesaian;
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Sarana dan Prasarana;
- Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan.

Capaian indikator kinerja sasaran 5 tersebut didukung oleh kinerja program/*outcome* sebagai tolok ukur jangka pendek yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian dan target indikator *outcome* tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat mengenai kinerja unit pelayanan publik, membandingkan harapan dengan pelayanan yang diterima. IKM digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkala, mengacu pada aturan seperti Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.

Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Mengukur tingkat kepuasan, bahan perbaikan pelayanan, dan menilai kinerja aparatur.

Dari gambaran diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai 91.00 mutu layanan Sangat Baik, hasil dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar.17. Survey Kepuasan Masyarakat

c. Solusi

Untuk pencapaian target kinerja ini akan dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Memberikan definisi operasional yang jelas pada indikator kinerja yang ada di dokumen IKU.
2. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
3. Mengadakan rapat evaluasi atas capaian kinerja secara berkala (triwulan) dan mendokumentasikannya seperti membuat notulen dan daftar hadir serta dokumentasi foto.

4. Membentuk tim internal untuk melakukan revidi atas laporan kinerja dengan memastikan bahwa laporan kinerja telah sesuai dengan format laporan kinerja yang ada di Permenpan 53 tahun 2014.
5. Memperbaiki kualitas dokumen Laporan Kinerja diantaranya dengan menyajikan perbandingan target realisasi kinerja tahun berjalan dengan target kinerja akhir RPJMD dan realisasi capaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian.
6. Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja. Membuat matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP dan membuat laporan atas tindak lanjut yang disertai dengan menguraikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
7. Penguatan Komitmen dan SDM;
8. Perencanaan Berorientasi Hasil;
9. Implementasi Berbasis kinerja ;
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
11. Evaluasi dan Pelaporan Berkala Inovasi dan transparansi.
12. Pendidikan Formal (Tugas belajar)
13. Pembelajaran Klasikal yaitu dengan: Bimtek, Seminar/ workshop, Kursus, sosialisasi.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14. Analisis Capaian Indikator Sasaran
1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2025-
2029**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	82,36	72	114,3
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50	67	117,2

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi dari indikator indeks Profesionalisme ASN realisasi akumulasi di Tahun 2025 telah mencapai target dengan nilai 82,36 dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 78,50 Nilai dengan Predikat BB, nilai ini telah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.5. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah adalah:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, terdiri dari 5 kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2025 kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 9.079.049.540,00. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 8.357.182.305,00 atau 92,05 % sehingga terjadi SILPA sebesar 7,95 %.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.15. Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah	9.079.049.540,00	8.357.182.305,00	92,05
2.	Belanja Operasi	9.002.848.540,00	8.288.093.465,00	92,04
	a. Belanja Pegawai	5.552.821.790,00	5.017.669.322,00	90,36
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.450.026.750,00	3.268.424.143,00	94,74
3	Belanja Modal	78.201.000,00	71.088.840,00	93,29

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Alokasi Anggaran Belanja Operasi untuk Mencapai Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	9.002.848.540,00	8.286.093.465,00	92,04
2	Belanja Operasi Untuk Sasaran	9.079.049.540,00	8.357.182.305,00	92,05

Alokasi anggaran untuk pencapaian 5 sasaran strategis sebesar Rp.9.079.049.540,00 dari total pagu anggaran belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp.9.002.848.540,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.286.093.465,00 dengan persentase penyerapan sebesar 92,04%.

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

Tabel 3.17. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Jml Prog	Jml Keg	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	285.697.300,00	272.526.280,00	95,38
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1	1	1.927.390.650,00	1.905.740.519,00	98,88
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
4	Meningkatnya Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Daerah	1	1	92.601.000,00	43.476.200,00	46,95
5	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	5	6.679.694.590,00	6.049.694.006,00	90,57
		5	9	9.079.049.540,00	8.357.182.305,00	92,05

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.18 Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.679.694.590,00	6.049.694.006,00	90,57
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.552.821.790,00	5.017.669.322,00	90,36
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.552.821.790,00	5.017.669.322,00	90,36
A.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.259.400,00	214.331.695,00	93,08
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.514.900,00	9.240.195,00	97,11
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.909.000,00	52.400.436,00	92,08
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.833.500,00	31.995.650,00	86,87
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.002.000,00	26.009.298,00	96,32
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	94.686.116,00	94,69
A.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.995.000,00	3.940.500,00	98,64
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.995.000,00	3.940.500,00	98,64
A.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.994.400,00	586.044.189,00	89,75
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.780.000,00	140.110.519,00	70,49



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.214.400,00	444.933.670,00	98,17
A.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.624.000,00	227.708.300,00	95,03
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.024.000,00	170.403.300,00	95,18
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.600.000,00	38.460.000,00	94,73
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.845.000,00	94,23
B.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	285.697.300,00	272.526.280,00	95,39
B.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	285.697.300,00	272.526.280,00	95,39
1.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi masyarakat	12.320.000,00	12.000.000,00	97,40
2.	Pelayanan Informasi Publik	58.522.500,00	58.082.185,00	99,25
3.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	5.400.000,00	2.880.000,00	53,33
4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	87.221.000,00	80.437.075,00	92,22
5.	Penyusunan Konten	122.233.800,00	119.127.020,00	97,46
C.	Program Aplikasi Informatika	1.927.390.650,00	1.905.740.519,00	98,88
C.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh	27.363.650,00	25.564.410,00	93,42



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650,00	25.564.410,00	93,42
C.2	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.900.027.000,00	1.880.176.109,00	98,96
1.	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	7.190.000,00	6.948.600,00	96,64
2.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	127.500.000,00	122.663.871,00	96,21
3.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	666.859.000,00	656.304.638,00	98,42
4.	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	5.650.000,00	2.190.000,00	38,76
5	Penyediaan Akses Internet	1.092.828.000,00	1.092.069.000,00	99,93
D.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
D.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
1.	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
E.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	92.601.000,00	43.476.200,00	46,95
E.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92.601.000,00	43.476.200,00	46,95
1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.811.000,00	3.344.200,00	69,51
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.790.000,00	40.132.000,00	45,71

Ket :

Sasaran 1 : 

Sasaran 2 : 

Sasaran 3 : 

Sasaran 4 : 

Sasaran 5 : 



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitong Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terutama peningkatan kinerja pada indikator yang pencapaiannya kurang dari target. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025 ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian target kinerja pada tahun 2025 ini, akan dilakukan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun selanjutnya melalui berbagai cara antara lain :

1. Mengoperasikan dan melengkapi sarana prasarana yang mendukung gedung pusat operasional jaringan dan data sebagai infrastruktur TIK sehingga layanan SPBE dapat ditingkatkan.
2. Mengupayakan pemenuhan indikator-indikator baru dalam penilaian/evaluasi SPBE tahun 2025 agar target akhir RPJMD dapat tercapai.
3. melaksanakan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna terhadap layanan SPBE dan pelayanan informasi publik secara *online* dan *offline*.



4. meningkatkan kapasitas ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE, pelayanan diseminasi informasi, statistik dan keamanan informasi melalui pelatihan-pelatihan kompetensi.
5. Meningkatkan tata kelola PPID dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat.
6. menyelenggarakan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi melalui kontra pengindraan, security assessment dan jaring komunikasi sandi.
7. Meningkatkan peran keamanan informasi dalam penggunaan media informasi dan komunikasi publik serta TIK.
8. Menyiapkan rancangan program kegiatan yang lebih terarah dan terukur sesuai visi misi Kepala Daerah baru dengan mempertimbangkan capaian pada Renstra tahun 2025-2029.
9. Mengembangkan Kompetensi melalui diklat, seminar, bimtek ,webinar baik offline maupun online agar dapat tercapai IP ASN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
10. Meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dapat dilakukan dengan menyelaraskan dokumen perencanaan (RPJMD/Renja), menyusun indikator kinerja yang terukur ([cascading](#)), serta mengintegrasikan perencanaan, anggaran, dan pelaporan. Fokus utama adalah memastikan kinerja OPD berorientasi hasil (*outcome*), menerapkan e-SAKIP, dan komitmen pimpinan dalam evaluasi triwulan.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur akan terealisasi lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan berbagai stakeholder, sumber daya aparatur, serta penajaman dan penyamaan visi untuk membangun Belitung Timur lebih maju dalam segala aspek pembangunan di daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja tersebut akan diimplementasikan pada penilaian kinerja individu yang terlibat didalamnya. Hal ini akan dijabarkan dalam penilaian kinerja individu yang telah diselaraskan melalui pengaplikasian e-kinerja.

LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan
Alamat : Jl. Raya Manggar - Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Manggar (33511)
Telp/ Fax. (0719) 9220007/9220008 Email : diskominfo@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 188.4/ 01-a /DISKOMINFO SP/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2025
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj), maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI ,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya yang tersebut dalam Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 bertugas mengumpulkan data dan informasi capaian kinerja tahun 2025 dan menyusun dokumen Laporan Kinerja (LKj).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 06 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur,



PARTONO, S.Pd
Pembina TK I/IV b
NIP. 19650909 199412 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 188.4/ 01.4 /DISKOMINFO SP/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	PARTONO, SPd NIP. 19690909 199412 1 001 Pembina Tk. I /IVb	Sekretaris Dinas	Ketua
2	TRI WAHYUNI KURNIATI, S.AP NIP. 19780113 200003 2 002 Penata TK I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretaris
3	SONY APRIYANTO, S.Sos NIP. 19780416 200604 1 021 Pembina/IVa	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4	CAESAR FRIADI M, ST, M.Eng NIP. 19810911 200604 1 015 Pembina/IVa	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
5	IRSYADINNAS, S.Stat, M.I.R NIP. 19790205 200604 1 006 Penata TK. I/III d	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Anggota
6	SUDIRMAN NIP. 19790305 200604 1 007 Penata TK. I/III d	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
7	OKTAPIANI, S.AP NIP. 19761015 200112 2 003 Penata TK I / III d	Statistisi Muda	Anggota

8	KARTINI,S.IP NIP.19840519 200501 2 001 Penata TK I/III.d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	EVI KHOMALA DEWI,S.Kom NIP.19890621 202202 2 001 Penata Muda /IIIa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	RULINI MUTIA,SE NIPPPK.19881224 2023212 038	Perencana Ahli Pertama	Anggota

Plt.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur,



PARTONO,S.Pd
Pembina TK I/IV b
NIP. 19690909 199412 1 001



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Nomor SOP

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Tanggal Pembuatan

Oktober 2019

Tanggal Revisi

Agustus 2021

Tanggal Efektif

1 September 2021

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Nama SOP

Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP)

Kualifikasi pelaksana

Minimal D3
Memahami tugas pokok dan fungsi
Memiliki kemampuan tentang indikator dan pengukuran kinerja

Keterkaitan

SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Peralatan/perlengkapan

1 ATK
2 Buku Agenda
3 Komputer
4 Kalkulator
5 e-Mail

Peringatan

Apabila prosedur tidak dilakukan maka data kinerja tidak tersedia

Pencatatan dan pendataan

Target indikator dan capaian/realisasi indikator
Dokumen data capaian kinerja

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET
		SEKDIN	PERENCANA	Staf	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubbag KPP untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja	□				Jadwal kerja	15 Menit	Memo Disposisi	
2	Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja		□			Memo Disposisi	45 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
3	Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja		□			Formulir pengumpulan data capaian kinerja	15 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
4	Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada bidang			□		Formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 Menit	Tanda terima	
5	Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja				□	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	2 Hari	Data capaian kinerja	
6	Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag KPP				□	Data capaian kinerja	15 Menit	Data capaian kinerja	
7	Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja		□			Data capaian kinerja	2 Jam	Rekapitulasi data capaian kinerja	
8	Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag KPP			□		Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja	
9	Melaporkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada Sekretaris		□			Rekapitulasi data capaian kinerja	30 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja	
10	Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja, apabila setuju diserahkan kepada kasubbag KPP untuk penyusunan Laporan Kinerja, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan	◇				Rekapitulasi data capaian kinerja	1 Hari	Rekapitulasi data capaian kinerja	
11	Menyimpan data kinerja		□			Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Dokumen data capaian kinerja	



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor SOP

SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Tanggal Pembuatan

Oktober 2019

Tanggal Revisi

Agustus 2021

Tanggal Efektif

1 September 2021

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Nama SOP

Penyusunan Laporan Kinerja (LK)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP)

Kualifikasi pelaksana

Minimal D3
Memahami tugas pokok dan fungsi
Memiliki pengetahuan tentang indikator, pengukuran kinerja dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja

Keterkaitan

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Peralatan/perlengkapan

- 1 ATK
- 2 Buku Agenda
- 3 Komputer
- 4 Kalkulator
- 5 e-Mail













Peringatan

Apabila prosedur tidak dilakukan maka berakibat pada penyusunan Laporan Kinerja

Pencatatan dan pendataan

Capaian/realisasi indikator
Dokumen Laporan Kinerja

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LK)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET.
		KADIN	SEKDIN	TIM	PERENCANA	STAF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk penyusunan Laporan Kinerja						Surat masuk	1 hari	Disposisi pada surat masuk	
2	Membentuk Tim, memberi pengarahan						Disposisi pada surat masuk	1 hari	Tim Penyusun Laporan Kinerja	
3	Mengumpulkan bahan, merumuskan konsep Laporan Kinerja						DPA, Laporan Realisasi Anggaran, Data capaian kinerja	3 hari	Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	
4	Menyusun konsep Laporan Kinerja						Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Mengetik konsep Laporan Kinerja						Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Memeriksa konsep Laporan Kinerja. Jika setuju diserahkan kepada Tim. Jika tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki						Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
7	Memeriksa konsep Laporan Kinerja. Jika setuju diserahkan kepada Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada kasubbag untuk diperbaiki						Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
8	Memberi paraf						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	
9	Menandatangani Laporan Kinerja						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan untuk penggandaan dan pendistribusian						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
11	Memerintahkan staf untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	1 hari	Bukti pengiriman laporan	
12	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	15 Menit	Bukti pengiriman laporan	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP	SOP Pengukuran Data Kinerja
Tanggal Pembuatan	Juli 2025
Tanggal Revisi	Juli 2025
Tanggal Efektif	1 Agustus 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas,  BAYU PRIYAMBODO, SE., M.T NIP.19781220 200501 1 007
SEKRETARIAT	Nama SOP Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP);
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kualifikasi pelaksana :

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD;
Memiliki Kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD;
Memiliki Kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan OPD;
Memiliki Pengetahuan tentang perencanaan Kinerja;
Memiliki integritas;
Memiliki Kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Keterkaitan :

SOP Penyusun Laporan Kinerja
SOP Pengumpulan Data Kinerja

Peralatan/perlengkapan :

- 1 Renstra
- 2 Renja
- 3 Perangkat Komputer dan Printer
- 4 Format Pengumpulan Data Kinerja
- 5 e-Mail




Peringatan :





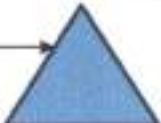
Apabila prosedur tidak dilakukan maka berakibat pada penyusunan Laporan Kinerja

Pencatatan dan pendataan :

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran

SOP PENGUKURAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKDIN	KABID	TIM SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris Dinas untuk melakukan pengukuran Kinerja					Surat dari Bupati/Inspektorat	5 Menit	Memo Disposisi	
2	Seretaris Dinas melakukan rapat dengan Tim SAKIP Tahunan untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja					Disposisi	60 Menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data					Notulen Rapat	120 Menit	Program kerja kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data kinerja					Juknis pengukuran kinerja, renstra dan program kerja kegiatan	1 hari	Kertas kerja pengukuran kinerja	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Kertas kerja pengukuran kinerja, Dokumen pengukuran data kinerja	1 Hari	Kertas kerja pengukuran kinerja	

6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap tujuan/sasaran/program/ kegiatan					kertas kerja pengukuran kinerja	120 Menit	Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	
7	Sekretaris dan Kabid mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP					Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	30 Menit	Draft laporan hasil pengukuran data kinerja	
8	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Dinas					Draft laporan hasil pengukuran data kinerja	90 Menit	Laporan hasil pengukuran kinerja, lembar disposisi	
9	Sekretaris Dinas melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas					Laporan Hasil pengukuran kinerja, lembar disposisi	30 Menit	Disposisi Kepala Dinas	
10	Pengarsipan data kinerja					Arsip hasil pengukuran data kinerja			

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitang Timur



BAYU PRIYAMBODO, SE., M.T

NIP. 19781220 200501 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU PRIYAMBODO,S.E.,M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. BURHANUDIN, SH

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN, SH



Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



BAYU PRIYAMBODO,S.E.,M.T
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan dan Persentase digitalisasi layanan publik	20%
2	Meningkatkan akses Masyarakat atas layanan informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi Publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	83%
3	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kabupaten	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	1 Sistem
4	Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level III
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,00 nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.832.597.250	APBD II
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 581.958.200	APBD II
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 341.434.900	APBD II

Program	Anggaran	Keterangan
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 230.122.300	APBD II
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.074.748.998	APBD II



Pihak Kedua
Drs. BURHANUDIN,SH

Manggar **Januari 2025**
Pihak Pertama


BAYU PRIYAMBODO,S.E.,M.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA OPD 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sesaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.	
									TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatkan Pemanfaatan TI dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik	Pemerataan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan pemerataan digitalisasi layanan publik	10%	A.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Obatapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IIR lokal Jaringan Intra pemerintah daerah 93,58%	27.363.850	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Cesar Priadi Melawandi, ST					Kab. Belitim	
				Sub Kegiatan Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 1 dokumen	27.363.850									
				B.	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 82,50%	2.896.233.800	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Cesar Priadi Melawandi, ST					Kab. Belitim	
				Sub Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan	100.000.000									
				Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen	7.100.000									
				Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 1 Aplikasi	40.000.000									
				Sub Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 33 unit	892.105.600									
Sub kegiatan Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 33 perangkat daerah	1.146.991.800													

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Output	Anggaran	Panggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Rn.		
									TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Sub Kegiatan koordinasi dan fasilitasi promosi Uterasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Uterasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1. Dokumen	26.318.200										
				Sub kegiatan Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 33 perangkat daerah	1.097.828.000										
2	Meningkatkan akses Masyarakat atas layanan Informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	83%	A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengiriman dan produksi Informasi terhadap isu yang berkembang 100%	581.868.200	Bayu Hambodo, S.E, M.T	Sony Aprianto, S.Sos						Kab. Batin		
				Sub kegiatan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 5 komunitas	16.370.000										
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permohonan	109.989.000										
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 dokumen	32.590.300										
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan utusan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 2 rekomendasi	195.452.400										
				Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik 48 konten	227.556.700										

No.	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.	
									TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Meningkatkan keamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan Informasi	level II	A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi perangkat daerah 75%	236.122.800	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Imadimas, S.Stat., M.I.R						Kab. Belitung	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota 1 laporan	47.364.000									
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan	41.027.500									
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 4 perangkat daerah	141.700.800									
4	Meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kabupaten	Siapa data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan metadata statistik sektoral tingkat Kabupaten, baik cetak maupun elektronik 100%	341.434.900	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Imadimas, S.Stat., M.I.R						Kab. Belitung	
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 7 orang	85.532.000									
				Sub Kegiatan Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 persentase	157.167.500									
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah diunggah metadata	98.735.600									

No.	Sesuai Strategi	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Pewangung Jereich	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.				
									TW I	TW II	TW III	TW IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai ekip perangkat daerah	76,00 mlai	A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar dan persentase penatausahaan keuangan sesuai standar 100%	6.327.061.798	Bayu Priambodo, S.T., M.T	Pertono, S.pd					DISKOMINFO SP				
					Sub Kegiatan Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	6.327.061.798									DISKOMINFO SP		
				B	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik 100% %Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi 80%	50.000.000	Bayu Priambodo, S.T., M.T	Pertono, S.pd							DISKOMINFO SP		
					Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4 orang	50.000.000										DISKOMINFO SP	
				C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah 100%	401.481.300	Bayu Priambodo, S.T., M.T	Pertono, S.pd								DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	18.254.300										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket	73.046.800										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket	70.413.000										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket	38.562.400										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140 laporan	400.000.000										DISKOMINFO SP	

No.	Sarana Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Objektif	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				D Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertase Pemertahan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah 100%	259.966.800	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Pardono, S.pd					DISKOMINFO SP	
				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 unit	1.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 unit	6.427.400							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pengada gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan 1 unit	1.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Saranada Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 17 unit	250.439.400							DISKOMINFO SP	
				E Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertase penyediaan jasa penunjang kantor 100%	939.425.100	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Pardono, S.pd					DISKOMINFO SP	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 2 laporan	10.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 laporan	245.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 laporan	394.425.100							DISKOMINFO SP	
				F Kegiatan Pemertahan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertase barang milik daerah dalam bentuk baik 100%	97.314.000	Bayu Priambodo, S.E, M.T	Pardono, S.pd					DISKOMINFO SP	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemertahan, Rasio Pemertahan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit	260.554.000							DISKOMINFO SP	
				Sub kegiatan Pemertahan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 1 unit	36.920.000							DISKOMINFO SP	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pola/kuasa	Jadwal				Lokasi	Ket.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi 111 unit	68.840.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi 30 unit	30.000.000							DISKOMINFO SP	



 Januari 2025
 Kepala OPD
 BAHU BRISAMBODO, S.P.A.T.
 Pembina Utama Muda (IV c)
 NIP. 197842302005011007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama

PARTONO, S.Pd
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19690909 199412 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (predikat)	76,00 nilai

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.127.061.798	APBD II
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	APBD II
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 601.081.300	APBD II
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 259.866.800	APBD II
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 639.425.100	APBD II
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 397.314.000	APBD II



Pihak Kedua

BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama

PARTONO, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690909 199412 1 001

No.	Strategic Strategy	Indicator Kinerja	Target	Segitany/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Pemasangan Isuasi	Fekubasa	Jadwal				Lubad	Met.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertihnan Pemeliharaan Dirivat Operasional atau Lainnyan.</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peroklung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah Kevasilan Dirivat Operasional atau Lainnyan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya 11 unit.</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 1 unit.</p> <p>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 111 unit.</p> <p>Jumlah Sarana dan Prasarana Peroklung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 30 unit.</p>	<p>200.000.000</p> <p>36.920.000</p> <p>68.800.000</p> <p>30.000.000</p>							DISKOMINFO SP	

Minggu, Januari 2025
 Sekretaris Dinas,

 Agus LOMO, S.DH
 Pendidikan: I/IV b)
 NIP. 19690809 199411 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Caesar Friadi Melawiandri, ST., M.Eng

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E.,M.T

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama


CAESAR FRIADI MELAWIANDRI, ST., M. Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19810911 200604 1 015

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan dan Persentase digitalisasi layanan publik	20%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.363.650	APBD II
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.805.233.600	APBD II



Pihak Kedua
BAYU PRIYAMBODO, S.E, M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama

CAESAR FRIADI MELAWIANDRI, ST., M. Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19810911 200604 1 015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Pemeriksaan	Metode				Lokasi	KRI	
								TA I	TA II	TA III	TA IV			
1				Sub kegiatan/kegiatan akan internet untuk pengisian data dalam rangka pengisian SPSE	Untuk Pengisian Data yang dimasukkan akan internet yang disediakan Diak 15 pengisi data	20.111.300								
				Sub kegiatan/kegiatan akan internet untuk pengisian data dalam rangka pengisian SPSE	Untuk Pengisian Data yang dimasukkan akan internet yang disediakan Diak 15 pengisi data	1.093.620.000								

Menteri, Januari 2015
 Kepala Bidang Aplikasi/Infra,

 SASAN STRATEGIS MELAKUKUKAN, ST. MALIK
 Penilaian / IV
 NIP. 19630911 200004 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sony Aprianto, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



SONY APRIANTO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19780416 200604 1 021

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatkan akses Masyarakat atas layanan informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi Publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	83%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 581.958.200	APBD II

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E, M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



SONY APRIANTO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19780416 200604 1 021

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA OPD 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ref.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Meningkatkan akses Masyarakat atas layanan Informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.	85%	A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Sota	Persentase Pengiriman dan produksi Informasi terhadap isu yang berkembang 100%	941.958.200	Bayu Pramobdo, S.E., M.T	Sony Aprianto, S.Sos	10	11	12	13	Kab. Belitung	
				Sub kegiatan kemitaan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiskusikan informasi dan tertafel di Dinas Kominfo 3 komunitas	16.370.000			10	11				
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permohonan	100.000.000			10	11	12	13		
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi kegiatan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 dokumen	32.590.100			10	11	12	13		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah responserasi komunitas terhadap isu publik yang berkembang dan sajian agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 3 rekomendasi	195.452.400			10	11	12	13		
				Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah konten Informasi Publik 40 konten	127.356.700			10	11	12	13		

Menggar, Januari 2025
 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

SONY APRANTO, S.Sos

Pembina (T/a)

NP. 19780416 200604 1 021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyadinnas, S.Stat.,M.I.R

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO,S.E., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO,S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



IRSYADINNAS, S.Stat.,M.I.R
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19880115 201001 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kabupaten	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	1 Sistem
4	Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level III

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 341.434.900	APBD II
2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 230.122.300	APBD II

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



IRSYADINNAS, S.Stat., M.I.R
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19880115 201001 1 003

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA OPO 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Tahap Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Est.	
									TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatkan keamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan Informasi	level III	A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dibatik Keamanan Informasi pemerintah daerah 75%	230.122.500	Sayu Priambodo, S.E., M.T	InsyaAllah, S.Stat., M.I.R						Kab. Belitum	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengalokasian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengalokasian sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota 1 laporan	47.394.000									
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan	41.027.500									
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 4 perangkat daerah	141.701.000									
2	Meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kabupaten	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingsud Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan metadata statistik sektoral tingkat Kabupaten, baik cetak maupun elektronik 200%	341.454.900	Sayu Priambodo, S.E., M.T	InsyaAllah, S.Stat., M.I.R						Kab. Belitum	
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 7 orang	60.533.000									
				Sub Kegiatan Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 persentase	157.167.900									
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	94.753.900									

Mangga, Januari 2025
 Kepala Bidang Keamatan Informasi Persandian dan Statistik,


INSYALAH, S.Stat., M.I.R
 Pemata Tk. I/III (0)
 NIP. 19880215 201001 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini, S.IP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PARTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

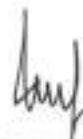
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



PARTONO, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690909 199412 1 001

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



KARTINI, S.IP
Penata, III/c
NIP. 19840519 200501 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67orang/bulan
		2	Jumlah Orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 orang
		3	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
		4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
		5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
		6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
		7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 laporan
		8	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit
		9	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit
		10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37 unit
		11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan
		12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan
		13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan
		14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit
		15	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
		16	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 unit
		17	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.127.061.798	APBD II
1.2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	APBD II
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 601.081.300	APBD II
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 259.866.800	APBD II
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 639.425.100	APBD II
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 397.314.000	APBD II

Pihak Kedua


PARTONO, S.Pd
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19690909 199412 1 001

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama


KARTINI, S.JP
 Penata, III/c
 NIP. 19840519 200501 2 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA OPD 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.				
									TW I	TW II	TW III	TW IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai akip perangkat daerah	76,00 nilai	A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar dan Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar 100%	6.127.061.798	Bayu Priambodo, S.E., M.T	Pertono,S,pd					DISKOMINFO SP				
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 orang	6.127.061.798									DISKOMINFO SP		
				B	Kegiatan Administrasi Eksekutif Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik 100 % %Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi 80%	50.000.000	Bayu Priambodo, S.E., M.T	Pertono,S,pd							DISKOMINFO SP		
					Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4 orang	50.000.000										DISKOMINFO SP	
				C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah 100%	601.081.300	Bayu Priambodo, S.E., M.T	Pertono,S,pd								DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	18.250.300										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket	73.846.600										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket	70.413.000										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket	98.562.400										DISKOMINFO SP	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140 laporan	400.000.000										DISKOMINFO SP	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1									10	11	12	13		
				D Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pejabat daerah 100%	259.886.800	Bayu Pliambodo, S.E, M.T	Pantono,S,pt					DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan pengadaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 unit	1.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 unit	3.427.600							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan 1 unit	1.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UHJ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 57 unit	250.499.400							DISKOMINFO SP	
				E Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor 100 %	699.425.100	Bayu Pliambodo, S.E, M.T	Pantono,S,pt					DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan	20.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 laporan	235.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 laporan	394.425.100							DISKOMINFO SP	
				F Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik 100%	397.314.300	Bayu Pliambodo, S.E, M.T	Pantono,S,pt					DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit	260.554.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit	36.920.000							DISKOMINFO SP	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal				Lokasi	Ket.
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajah/Direhabilitasi 111 unit	80.000.000							DISKOMINFO SP	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajah/Direhabilitasi 30 unit	30.000.000							DISKOMINFO SP	

Mangga, Januari 2025
 Kasubag Umum dan Kepegawaian

KARTINI, S.P.

Penata, II/c

NIP. 19840519 200501 2 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU PRIYAMBODO,S.E.,M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAMARUDIN MUTEN
Jabatan : Bupati Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



KAMARUDIN MUTEN

Manggar, 24 November 2025
Pihak Pertama



BAYU PRIYAMBODO,S.E.,M.T
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	81 <i>(persentase)</i>
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90) <i>(kategori)</i>
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE	3,50 <i>(nilai)</i>
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6 <i>(indeks)</i>
4	Meningkatnya keamanan informasi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2 <i>(level)</i>
5	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN	72 <i>(Nilai)</i>
		Nilai SAKIP perangkat daerah	67 <i>(Nilai)</i>


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.927.390.650	P-APBD
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 285.697.300	P-APBD
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 93.666.000	P-APBD
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 92.601.000	P-APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.679.694.590	P-APBD

Pihak Kedua


KAMARUDIN MUTEN

Manggar, 24 November 2025

Pihak Pertama


BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007

PERUBAHAN RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Tipe	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	No	Permasalahan (Ditubuhkan)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Unit/Teknis Renc. Pelaksanaan	
											Jumlah	Indikator	Tgl	Tgl 2	Tgl 3	Tgl 4	TOTAL				Eselon	Pejabat
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas layanan fungsi pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks profesionalisme ASN (IPA)	11	11	- Belum sepenuhnya terdapat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan analisis beban kerja dan peta jabatan. - Belum optimalnya kinerja pelayanan publik guna menunjang pemerintahan yang baik dan target secara lebih baik	Meningkatkan kualitas layanan pelayanan fungsi pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	47	1. Peninjauan dan Penyusunan Anggaran dilakukan dengan: - Efektifitas dibutuhkan untuk meningkatkan anggaran dibutuhkan untuk gaji pokok, keluarga dan pensiun (baya tambahan). - Selain Rencana Penganggaran dengan menyusun Anggaran ke dengan tepat. 2. Pelaksanaan dan Proses Administrasi dilakukan dengan: - Menetapkan peran dan tanggung jawab yang bertanggung jawab dalam proses penyediaan gaji dan tunjangan. - Proses perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait seperti Bidang Perencanaan pada Badan Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan Daerah. 3. Pemantauan Tambahan Dilakukan evaluasi efektifitas rencana ini dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan untuk perbaikan secara mendalam.	Orang-tahun	Jumlah orang yang menandatangani dan tunjangan ASN	36	44	58	87	87	Terdapat gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	5.022.821.750	Setoran Dana	IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, Persandian dan Statistik dan Birokrasi
				1 Paket					1. Menyusun Rencana kerja pelayanan dan anggaran ke Pegawai-pegawai untuk penyusunan RPTJ melakukan penelitian dan pengkajian masalah beladaria dan dijabarkan ke PPT, untuk diwujudkan dan implementasi ke dalam ke-Pegawai Anggaran	Paket	Jumlah paket kepegawaian termasuk tunjangan keluarga dan pensiun yang disediakan	0	0	0	0	1 Paket	Menyediakan komponen termasuk LK/PP/Perwakilan Anggaran Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Internal LK/PP/Perwakilan Anggaran Kantor	6.114.900	Setoran Dana	Keuangan Umum dan Anggaran, IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, Statistik dan Birokrasi	
				1 Paket						Paket	Jumlah paket perubahan dan pengalokasian beban yang disediakan	0	0	0	0	1 Paket	Menyediakan Perubahan dan Pengalokasian Kantor	Sub Kegiatan Penyelesaian Perubahan dan Pengalokasian Kantor	16.000.000	Setoran Dana	Keuangan Umum dan Anggaran, IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, Statistik dan Birokrasi	
				1 Paket						Paket	Jumlah paket beban gaji dan pensiun yang disediakan	0	0	0	0	1 Paket	Menyediakan beban gaji dan pensiun	Sub Kegiatan Penyelesaian Beban gaji dan pensiun	16.881.000	Setoran Dana	Keuangan Umum dan Anggaran, IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, Statistik dan Birokrasi	
				1 Paket						Paket	Jumlah paket barang modal dan perlengkapan yang disediakan	0	0	0	0	1 Paket	Menyediakan barang modal dan perlengkapan	Sub Kegiatan Penyelesaian Barang Modal dan Perlengkapan	27.000.000	Setoran Dana	Keuangan Umum dan Anggaran, IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, Persandian, Perencanaan, Birokrasi dan Publikasi	
				140 Laporan						Laporan	Jumlah penyempurnaan laporan keuangan dan kualitas SARA	39	53	84	86	140 Laporan	Mempertajam laporan keuangan dan kualitas SARA	Sub Kegiatan Penyempurnaan Laporan Keuangan dan Kualitas SARA	100.000.000	Setoran Dana	IF Audit Keuangan Pusat dan Daerah, dan Birokrasi	

Tipe	Indikator Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	No	Perencanaan (Jatidiri)	Sasaran	Indikator	Target	Bentuk Alat	Output		Target					Jenis Kegiatan	Sub Kegiatan	Kendali Anggaran	Unit/Output Kerja Pokok														
											Sasaran	Indikator	TAK	TWR	TWS	TWR	TOTAL				Basis	Sifat	Basis	Sifat	Basis	Sifat									
																											Basis	Sifat							
									8 Media		Media	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola dengan pemanfaatan media berbasis email (kantor/jarak)	1	1	1	1	4	8 Media	Terkaitan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengolahan Media Komunikasi Publik	11.220.000	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Prinsip Kerja Media, 2. Prinsip Kerja Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Pelaksanaan												
									48 Konten		Konten	Jumlah konten informasi publik	12	12	12	12	48 Konten	Terkaitan Penyelenggaraan Konten	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Konten	110.200.000	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Prinsip Kerja Media, 2. Prinsip Kerja Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Pelaksanaan													
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks SPI	2024	1,00	-	- Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Belum optimalnya transformasi digital birokrasi untuk mendukung pengembangan pelayanan berbasis smart city.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Aplikasi Informatika	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	1 Dokumen	- Pengendalian efektivitas SPI termasuk perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan SPI. - Pengujian penerapan data pemerintahan daerah dan efektivitas layanan berbasis media melalui pengembangan model layanan internet. - Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TI.	Dokumen	Jumlah dokumen pengumpulan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah dan domain pemerintah desa	1	1	1	1	4	1 Dokumen	Terkaitan penyelenggaraan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengujian nama domain pemerintah desa	Sub Kegiatan Pengujian Nama Domain dan Sub domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengujian nama domain Pemerintah Desa	20.350.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi												
									1 Dokumen	Jumlah dokumen keterlibatan pusat daerah dengan pusat data nasional				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.100.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi					
									10 unit	Jumlah perangkat daerah yang menghasilkan realisasi program kabupaten/kota sesuai	10																			117.000.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi			
									10 perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung ke layanan yang terhubung dengan jaringan data pemerintah daerah kota/kota	10																				600.000.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi		
									1 Laporan	Jumlah laporan kegiatan pelayanan publik terkait SPI dan/atau indikator penyelenggaraan SPI																						5.000.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi	
									10 perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang memfasilitasi atau mempromosikan layanan yang disediakan oleh dinas	10																						1.201.000.000	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Prinsip Kerja Komputer Media, 2. Prinsip Kerja Komputer Perencanaan, 3. Prinsip Kerja Komputer Pelaksanaan, 4. Prinsip Kerja Komputer Evaluasi

Tajuk	Indikator Tajuk	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	No.	Pernyataan (Justifikasi)	Sasaran	Indikator	Target	Kawasan Aka	Bajet		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Status Aka Pelaksanaan			
											Nama	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL		Sub Kegiatan Aka	Sub Kegiatan	Koordinator	Pelaksana
Terwujudnya sistem rekam yang akurat dan dapat dimanfaatkan	Tercapainya indikator, integrasi dan pembaruan data penyelenggaraan sistem rekam nasional (SRN)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan rekam rekod nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Rakib)	1.0		- Belum optimalnya penyelenggaraan statistik nasional dalam produksi data.	Tercapainya indikator, integrasi dan pembaruan data dalam penyelenggaraan sistem rekam nasional (SRN)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik nasional	100%	- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dibidang statistik - Melakukan pemutakhiran sistem statistik nasional terintegrasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik nasional sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI). - Melakukan Pembinaan secara berkala dan insentif kepada Pembaruan Data (PFD) agar MDR mampu menghasilkan data statistik sektoral yang seragam baik sebagai dasar dalam pembaruan pangkalan data.	Pembaruan	Pembaruan pangkalan data yang menggunakan data statistik untuk pembaruan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau pelayanan kesehatan.				100	100%	Peringkatnya Persebutan Sistem Statistik Nasional	Sub Kegiatan Peringkatnya persebutan sistem statistik nasional	83.000.000	Kepala Bidang Pembaruan Informasi Statistik dan Statistik	St. Sumawan Anil, St. Susanto Permana, Pengabdian Data Statistik
Meningkatnya keamanan informasi	Meningkatnya keamanan siber dan siber digitalisasi Pembaruan Data	Meningkatnya keamanan informasi digitalisasi Pembaruan Data	Target Pengukuran Pembaruan Data (DWD)	2		- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi untuk siber (SDI) (SDI)	Meningkatnya keamanan siber dan siber digitalisasi Pembaruan Data	Meningkatnya keamanan informasi digitalisasi Pembaruan Data	1 Laporan	- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dibidang Persebutan - Melakukan layanan keamanan informasi yang meliputi kegiatan: - Mengembangkan integ komunikasi siber antar perangkat daerah	Laporan	Jumlah laporan analisis bahaya dan pengendalian sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Yota			1	1 Laporan	Terbitnya Analisa Bahaya dan Pengendalian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Yota	Sub Kegiatan pembaruan siber keamanan dan pengabdian sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Yota	4.811.000	Kepala Bidang Pembaruan Informasi Statistik dan Statistik	St. Sumawan Anil, Permana, St. Manggala Informatica dan permana	
									4 Peringkat Daerah	- Penguatan jejaring pelaksanaan kegiatan Pembinaan ST perwujudan pembaruan dan prinsip administratif pembaruan	Peringkat Daerah	Jumlah peringkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi dan pembaruan			2	2	4 Peringkat Daerah	Terbitnya keamanan informasi Pembaruan Kabupaten/Yota	Peringkat Sub Kegiatan Pembinaan keamanan informasi Pembaruan Daerah Kabupaten/Yota	97.780.000	Kepala Bidang Pembaruan Informasi Statistik dan Statistik	St. Sumawan Anil, Permana, St. Manggala Informatica dan permana

Wanggar, 24 November 2025
Kepala Dinas

SATU PRATYAKSA, TERAKT
Pusat Data Utama Madya IV c
Rakib 1078122030001 1 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025
Pihak Pertama




PARTONO, S.Pd
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19690909 199412 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Fungsi Penunjang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100 (Persentase)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 (Nilai)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.552.821.790	P-APBD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 0	P-APBD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 230.259.400	P-APBD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.995.000	P-APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 652.994.400	P-APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 239.624.000	P-APBD

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025
Pihak Pertama



PARTONO, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690909 199412 1 001

PERUBAHAN RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	No	Kerangka Kerja (Jumlah)	Sasaran	Indikator	Target	Mendeskripsikan	Output		Target					Jenis Kegiatan Awal	Sub Kegiatan	Kendala Anggaran	Indikator Kinerja Pelaksanaan	
											Jumlah	Indikator	TWR	TWR II	TWR III	TWR IV	TOTAL				Kuantitas	Pola
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan informasi	Indeks profesionalitas ASN (IPA)	73	1	Belanja komunikasi, informasi dan statistik	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan informasi	87	1. Peningkatan dan Penguatan Anggaran dilakukan dengan: a. Melakukan koordinasi yang mengintegrasikan anggaran ke seluruh unit kerja untuk bersinergi dan optimalisasi biaya pelaksanaan. b. Papan Rencana Penganggaran dengan memajukan Anggaran Baru dengan tepat. c. Pelaksanaan dan Proses Administrasi dilakukan dengan: d. Melakukan serani dan tanggung jawab yang bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan publik dan layanan. e. Proses pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait seperti: Bidang Personalia dan terkait Belanja Anggaran Keuangan dan Anggaran Daerah. g. Pemantauan Realisasi. h. Melakukan evaluasi efektivitas rencana dan pelaksanaan pemantauan dan laporan untuk perbaikan kinerja mendatang.	Chung/ Luas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36	44	36	47	47	Terpadu (gaji dan Tunjangan ASN)	Sub Kegiatan Peningkatan Kual dan Tunjangan ASN	1.022.821,796	Indikator Kinerja	IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi
				1 Paket					Melakukan koordinasi, bauran, pemeliharaan dan pengendalian ke Pengantar Anggaran untuk pemeliharaan. PPTI melakukan pemeliharaan dan pemantauan melalui koordinasi dan dukungan ke PPTI untuk klarifikasi dan melaporkan hasilnya ke Pengantar Anggaran.	Paket	Jumlah paket komunikasi, informasi dan statistik yang dilaksanakan	1	1 Paket	Menghasilkan Komitmen Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Indikator dan Pelaksanaan Anggaran	8.014.000	Indikator Kinerja	Kualitas Kinerja dan Keagregasian, IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi				
				1 Paket					Melakukan koordinasi, bauran, pemeliharaan dan pengendalian ke Pengantar Anggaran untuk pemeliharaan.	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pengendalian yang dilaksanakan	1	1 Paket	Menghasilkan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	Sub Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	15.995.000	Indikator Kinerja	Kualitas Kinerja dan Keagregasian, IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi				
				1 Paket					Melakukan koordinasi, bauran, pemeliharaan dan pengendalian ke Pengantar Anggaran untuk pemeliharaan.	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pengendalian yang dilaksanakan	1	1 Paket	Menghasilkan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	Sub Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	16.016.000	Indikator Kinerja	Kualitas Kinerja dan Keagregasian, IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi				
				1 Paket					Melakukan koordinasi, bauran, pemeliharaan dan pengendalian ke Pengantar Anggaran untuk pemeliharaan.	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pengendalian yang dilaksanakan	1	1 Paket	Menghasilkan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	Sub Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan dan Pengendalian Anggaran	27.992.000	Indikator Kinerja	Kualitas Kinerja dan Keagregasian, IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi				
				140 Laporan					Melakukan koordinasi, bauran, pemeliharaan dan pengendalian ke Pengantar Anggaran untuk pemeliharaan.	Laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan	140	140 Laporan	Menghasilkan Laporan dan Pengendalian Anggaran	Sub Kegiatan Peningkatan Laporan dan Pengendalian Anggaran	100.000.000	Indikator Kinerja	IP Anali Keuangan Publik dan Daerah, Pemantauan dan Realisasi				

Tahun	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	No	Ternyata/Realisasi (Rp/%)	Sasaran	Indikator	Target	Berkas Aktif	Output		Target					Indikator B2C	Sub Kegiatan	Luas Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
											Setoran	Subsidiar	TR 0	TR 1	TR 2	TR 3	TOTAL				Kuantitas	Pelaksana
									37 unit	Mengikuti Rencana pelaksanaan anggaran Mendukung dan melaksanakan kegiatan lomba dan pameran dan pameran lain melalui Sandiwara PPTK melakukan secara luring dan daring untuk memperoleh manfaat ke PA	37 unit	37 unit	1				37 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba atau pameran lainnya	Sub Kegiatan Pendidikan Literasi dan Penguatan Pendidikan Belajar Kader atau Regenerasi Lulusan	2.951.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									1 Laporan	Mengikuti Rencana daftar pemetaan dan pengalokasian ke Prinsip-prinsip untuk pemenuhan PPTK melakukan pemetaan dan pemeliharaan untuk pemenuhan dan dukungan ke PPTK untuk di verifikasi dan melaksanakan kegiatan ke Prinsip-prinsip	Laporan	1 Laporan	1	1			1 Laporan	Terwujudnya pemenuhan dan pemeliharaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Surat Menyurat	1.000.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									8 Laporan	Mengikuti Rencana daftar pemetaan dan pengalokasian ke Prinsip-prinsip	Laporan	8 Laporan	2	2		1	8 Laporan	Terwujudnya pemenuhan dan pemeliharaan sumber daya manusia	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Survei dan Pengukuran	176.750.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									6 Laporan	Mengikuti Rencana daftar pemetaan dan pengalokasian ke Prinsip-prinsip	Laporan	6 Laporan	2	2	1	1	6 Laporan	Terwujudnya pemenuhan dan pemeliharaan sumber daya manusia	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kader	811.214.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									11 unit	Mengikuti Rencana daftar pemetaan dan pengalokasian ke Prinsip-prinsip untuk pemenuhan dan pemeliharaan untuk pemenuhan dan dukungan ke PPTK untuk di verifikasi dan melaksanakan kegiatan ke PA	11 unit	11 unit	3	3	2	1	11 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba atau pameran lainnya	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Bina Pemeliharaan, Pabrik dan Perbaikan Kader atau Regenerasi Lulusan	171.224.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									31 unit	Mengikuti Rencana pelaksanaan anggaran Mendukung dan melaksanakan kegiatan lomba dan pameran dan pameran lain melalui Sandiwara PPTK melakukan secara luring dan daring untuk memperoleh manfaat ke PA	31 unit	31 unit					31 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba atau pameran lainnya	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kader atau Regenerasi Lulusan	41.607.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping
									20 unit	Mengikuti Rencana pelaksanaan anggaran Mendukung dan melaksanakan kegiatan lomba dan pameran dan pameran lain melalui Sandiwara PPTK melakukan secara luring dan daring untuk memperoleh manfaat ke PA	20 unit	20 unit			11	9	20 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba atau pameran lainnya	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kader atau Regenerasi Lulusan	41.607.000	Seviteria Dinas	Kendamping Umum Penyelenggara/ Ahli/ Ekspert/ Pustakawan/ Dosen/ dan pendamping

Mangga, November 2025
 Sekretaris Dinas,


 Fajriano, S.Pd
 Nombina 76/07/0
 NIP. 19690901994121001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Caesar Friadi Melawiandri, ST., M.Eng

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E.,M.T

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025

Pihak Pertama



CAESAR FRIADI MELAWIANDRI, ST., M. Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19810911 200604 1 015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	tingkat kematangan aspek TIK	3 (Nilai)
		tingkat kematangan aspek TIK/ Teknologi digital	3 (Nilai)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.363.650	P-APBD
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.900.027.000	P-APBD

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025
Pihak Pertama



CAESAR FRIADI MELAWIANDRI, ST., M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19810911 200604 1 015

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sony Aprianto, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007



Manggar, November 2025
Pihak Pertama
SONY APRIANTO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19780416 200604 1 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100 (Persen)
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100 (Persen)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 285.697.300	P-APBD

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025
Pihak Pertama



SONY APRIANTO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19780416 200604 1 021

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Irsyadinnas, S.Stat.,M.I.R
Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAYU PRIYAMBODO,S.E., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Belitung Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
BAYU PRIYAMBODO,S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

Manggar, November 2025
Pihak Pertama

IRSYADINNAS, S.Stat., M.I.R
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19880115 201001 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	100 (Persentase)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6 (Indeks)
2	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	75 (Persentase)
		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2 (Level)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 93.666.000	P-APBD
2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 92.601.000	P-APBD

Pihak Kedua



BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19781220 200501 1 007

**Manggar, November 2025
Pihak Pertama**



IRSYADINNAS, S.Stat., M.I.R
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19880115 201001 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini, S.IP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PARTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


PARTONO, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690909 199412 1 001

Manggar, November 2025
Pihak Pertama


KARTINI, S.IP
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19840519 200501 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai standar	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 (persen)
2.	meningkatnya aparatur yang berkinerja baik	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	100 (persen)
3.	meningkatnya pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 (persen)
4.	terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 (persen)
5.	Tersedianya jasa penunjang kantor	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100 (persen)
6.	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 (persen)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.552.821.790	P-APBD
1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0	P-APBD
1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 230.259.400	P-APBD
1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.995.000	P-APBD
1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 652.994.400	P-APBD
1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 239.624.000	P-APBD

Pihak Kedua



PARTONO, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690909 199412 1 001

Manggar, November 2025
Pihak Pertama



KARTINI, S.IP
Penata Tk.I/IIId
NIP. 19840519 200501 2 001

